



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD DI KORAMIL
1504-02/SIRIMAU AMBON DALAM MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN PASCA KONFLIK KOMUNAL**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**HARRY EKO SUTRISNO
120140107026**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERTAHANAN DARAT**

**BOGOR
OKTOBER 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Harry Eko Sutrisno
NPM : 120140107026
Program Studi : Strategi Pertahanan Darat
Judul Studi : Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau
Ambon dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Pasca Konflik
Komunal.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr.Herlina JR Saragih,M.Si (.....)

Pembimbing II : Kolonel Kav Drs.Wibisono Poespito Hadi,M.Sc.,M.Si(Han)(.....)

Penguji I : Dr. Supandi (.....)

Penguji II : Kolonel Czi G.Eko Sunarto,S.Pd.,M.Si. (.....)

Penguji III : Letkol Kav Rahman,S.Pd.,M.Sc. (.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Oktober 2015

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Harry Eko Sutrisno
Nomor Mahasiswa : 120140107026
Program Studi : Strategi Pertahanan Darat
Judul Tesis : PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD DI KORAMIL
1504-02/SIRIMAU AMBON DALAM MENJAGA
STABILITAS KEAMANAN PASCA KONFLIK
KOMUNAL

Telah disetujui oleh dosen Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diadakan ujian secara lisan dihadapan dewan penguji sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Terapan dalam bidang Ilmu Pertahanan pada program studi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr.Herlina JR Saragih M.Si

Drs.Wibisono Poespito Hadi,M.Si(Han)
Kolonel Kav NRP 30522

Bogor, September 2015

Mengetahui

Dekan Fakultas Strategi Pertahanan

I Gede Sumertha, KY, PSC, M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Oktober 2015

Harry Eko Sutrisno

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harry Eko Sutrisno
NPM : 120140107026
Program Studi : Strategi Pertahanan Darat
Program Studi : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD DI KORAMIL 1504-02/SIRIMAU AMBON
DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN PASCA KONFLIK KOMUNAL**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dalam tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Oktober 2015

Yang menyatakan

Harry Eko Sutrisno

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyandang gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Saya sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya berhak mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Mayor Jenderal TNI I Gede Sumertha, KY, PSC, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dorongan semangat dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr. Herlina JR Saragih, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dorongan semangat dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Kolonel Kav Drs. Wibisono Poespito Hadi, M.Si. (Han) selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kepala Program Studi Strategi Pertahanan Darat yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk arahan, bimbingan, dan dorongan semangat dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Dr. Supandi selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan tesis ini;
- (5) Kolonel Czi G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan tesis ini;
- (6) Letnan Kolonel Kav Rahman, S.Pd., M.Sc. selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan tesis ini;
- (7) Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Munardo, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, S.Sos beserta seluruh staf dan anggotanya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan;

- (8) Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Bambang Taufiq dan Brigjen TNI Juwondo serta Asisten Personel Kasdam XVI/Pattimura Kolonel Inf Basuki Achmad S.,S.I.P dan Waaspers Kasdam XVI/Pattimura Letnan Kolonel Inf Wawan S.,S.Sos,M.Si. yang telah banyak membantu memberikan kesempatan dan waktu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
- (9) Kapten Inf M. Rizal, Danramil 1504-02/Sirimau Ambon beserta anggotanya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan ;
- (10) Bapak Camat Sirimau Drs. Herman Tetelepta,M.Si. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan
- (11) Bapak M.Amin, tokoh masyarakat di Ambon, Maluku yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan
- (12) Rekan-rekan Strategi Pertahanan Darat Cohort-1 abituren Dikreg 52 Seskoad TA.2014 yang tetap kompak dan baik hatinya, yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan dorongan semangat dalam penyelesaian tesis ini;
- (13) Rekan-rekan Sekretariat Fakultas Strategi Pertahanan, Kpt Inf Jazuli, Mayor Inf Rofiq, Mbak Mayang dll. yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan dorongan semangat dalam penyelesaian tesis ini;
- (14) Kedua Orang tua Haji Mustaji HM. dan Hajjah Sri Sujiati, kedua mertua saya Emrun,M.Mar dan Helmawati (alm), istri saya, drg.Elvira Andrawina, anak-anak saya Alissya Rheina Latifah dan Rizqi Dwi Ramadhan serta adik-adikku dan ipar tercinta, Fandy dan Niniq, Nanik dan bang Dodid Zulkarnaen (alm), Kak Dani dan kak Emil serta Rifqi dan Sherly yang semuanya sangat saya cintai dan selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan dorongan semangat kepada saya dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme SDM Pertahanan di masa mendatang.

Bogor, Oktober 2015

ABSTRAK

Nama : Harry Eko Sutrisno
Program Studi : Strategi Pertahanan Darat
Judul : Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil
1504-02 / Sirimau Ambon dalam Menjaga
Stabilitas Keamanan Pasca Konflik Komunal.

Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik. Tujuan penelitian, untuk : *Pertama*, Menganalisis bagaimana profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal ; *Kedua* Menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya dan ; *Ketiga* Menganalisis upaya yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Tehnik analisis data pada penelitian ini mengacu kepada Milles dan Hubberman.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil belum optimal disebabkan oleh antara lain ; komunikasi sosial serta koordinasi yang dilakukan prajurit TNI AD baru menyentuh pada kalangan menengah ke bawah, belum adanya tunjangan kemahalan dan belum memadainya perumahan prajurit ; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme terdiri dari faktor Eksternal dan Internal ; 3) Upaya yang telah dilakukan Koramil 1504-02/Sirimau di dalam mencapai profesionalisme adalah secara fisik melalui kerja bakti, gotong royong, bedah rumah dan giat pembinaan teritorial lainnya. Kegiatan non fisik melalui pendekatan melalui komunikasi sosial terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan serta diadakannya ceramah wawasan kebangsaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini perlu disarankan adanya pelatihan Komunikasi Sosial prajurit, peningkatan kesejahteraan prajurit, implemtasi tunjangan kemahalan dan dibangunnya perumahan yang layak huni dan humanis bagi prajurit dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tetap berbaurnya perumahan prajurit
Kata kunci : Profesionalisme, Koramil, Stabilitas keamanan, Konflik, Pasca konflik

ABSTRACT

This research was design to gain understanding of profesionalism of Indonesian Army in Koramil (Military Rayon Command)1504-02/Sirimau Ambon in maintaining security and stability post-conflict. The research purposes to ; First : To analyze how the Indonesian Army Soldier in Koramil 1504-02/Sirimau Ambon maintain security stability in post- conflict ; Second : Analyzing the factors that could influencethe profesionalism of Indonesian army soldiers in 1504-02/Sirimau Ambon. Third : Analyze the efforts to achieve the Indonesian Amy profesionalism in Koramil 1504-02/Sirimau Ambon to maintaince security and stability post-communal conflict. This study uses qualitative approach with interviews as data coolection method. Technical analysis of the data in this study refers to Milles and Hubberman.

This results shows : 1)The profesionalism of Indonesian army soldier at Koramil 1504-02/Sirimau Ambon is not optimal yet due to seveeral things ; There is no expensive allowance to offset the high prices of goods in the area as well as accepted in other areas (Papua), Inadequate housing for soldiers and the social communication and coordination Army soldiers who carried out the new touch on the middle to lower 3) Efforts have been made by Koramil 1504-02 / Sirimau in achieving professionalism are physical and non-physical. Physically activity has been done through voluntary work, mutual cooperation, poor's people surgical houses and other territorial developement viable. Non-physical activities through the approach through social communication for religious leaders, community leaders and government officials as well as the holding of national awareness lectures.

Based on the results of this study researcher would like to give advised namely; Social Communication Training for soldier, Improved welfare of the army, Implementation expensiveness allowances, and The construction of housing habitable and humane for soldiers.

Key word : Profesionalism, Military Rayon Command, Security stability, Conflict, Post-conflict.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Ruang Lingkup	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	16
2.1.1 Landasan Teori.....	16
2.1.2 Teori Profesionalisme	16

2.1.3 Teori Konflik.....	27
2.1.3.1 Manajemen Konflik.....	30
2.1.3.2 Resolusi Konflik.....	33
2.1.4 Teori Stabilitas Keamanan.....	35
2.1.5 Teori Komunikasi.....	37
2.1.6 Teori Peran.....	38
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	39
2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	44
3.2 Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian.....	44
3.2.1 Sumber Data.....	44
3.2.2 Subyek Penelitian.....	44
3.2.3 Obyek Penelitian.....	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.4 Tehnik Analisis Data.....	46
3.5 Prosedur Penelitian.....	48
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	50
3.5.2 Data Primer.....	53
3.5.3 Data Sekunder.....	53
3.5.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data.....	53
3.6. Definisi Operasional.....	53
3.7. Jadwal Penelitian.....	54

BAB 4 ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Data Penelitian.....	58
4.1.1 Gambaran Umum Koramil 1504-02/Sirimau Kota Ambon.....	48
4.1.2 Struktur Organisasi.....	59
4.1.3 Tugas Pokok dan Tugas-tugas.....	60
4.1.4 Organisasi	60
4.1.5 Pembagian Tugas dan tanggung jawab.....	62
4.2 Analisis Data	68
4.2.1 Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/SirimauAmbon di dalam menjaga Stabilitas keamanan pasca konflik Komunal di Kota Ambon.....	65 68
4.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504- 02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal.....	72
4.2.2.1. Faktor Pendukung.....	72
4.2.2.2 Faktor-faktor Penghambat.....	84
4.2.3 Upaya yang dilakukan Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Pasca Konflik Komunal secara professional.....	88
4.3 Pembahasan.....	91

4.3.1 Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/SirimauAmbon di dalam menjaga Stabilitas keamanan pasca konflik Komunal di Kota Ambon.....	91
4.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504- 02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal.....	94
4.3.3 Upaya yang dilakukan Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Pasca Konflik Komunal secara profesional...	95
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	97
5.2 Saran	98
5.2.1 Saran Teoritis	98
5.2.2 Saran Praktis	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
Lampiran 1 SURAT IJIN PENELITIAN	
Lampiran 2 PANDUAN WAWANCARA	
Lampiran 3 DOKUMENTASI WAWANCARA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koramil dengan wilayah lebih dari 1 Kecamatan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Matriks potensi ancaman keamanan pasca konflik komunal
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian

**PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD
DI KORAMIL 1504-02/SIRIMAU AMBON DALAM MENJAGA
STABILITAS KEAMANAN PASCA KONFLIK KOMUNAL**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.506, dengan perairan laut teritorial terluas di dunia, yakni 3,2 juta km², ditambah perairan ZEE seluas 2,9 juta km² (terluas keduabelas di dunia), serta dengan garis panjang kelima di dunia, yakni sepanjang 95.108 km² (Jurnal Pertahanan, Agustus 2011). Hal ini menyebabkan Indonesia juga diperkirakan memiliki lebih kurang 500 suku bangsa dan sekitar 350 bahasa. Keanekaragaman suku bangsa, agama dan etnis serta golongan di Indonesia ini tentunya merupakan kekayaan yang sangat besar dan berharga bagi masyarakatnya.

Indonesia juga merupakan sebuah negara dengan struktur dan sistem sosial masyarakatnya yang sangat majemuk. Adam Kuper dan Jessica Kuper (2008) menjelaskan bahwa istilah majemuk telah digunakan untuk menjelaskan masyarakat yang ditandai dengan pembelahan (*cleavages*) internal berdasarkan etnis, ras, agama atau bahasa. Keanekaragaman budaya di Indonesia telah membuat adanya potensi konflik dan disintegrasi bangsa. Keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia yang menimbulkan adanya potensi konflik yang amat besar yang perlu diantisipasi penanganannya secara tepat.

Wilayah Indonesia yang sangat luas tersebut menimbulkan adanya potensi konflik yang bersumber dari politik, sosial, agama dan ras sehingga sangat diperlukan penanganan pasca konflik. Seperti yang kita

ketahui bersama bahwa konflik dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Terdapatnya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial menyebabkan konflik merupakan situasi yang wajar di dalam setiap masyarakat. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya sehingga dapat dikatakan konflik tersebut hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain (Killman dan Thomas, 1978). Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (Wijono, 1993). Disampaikan oleh Tri Ratnawati (sebagaimana dikutip dalam Louis Kriesberg, 2003, hal. 384) pemeliharaan stabilitas keamanan pasca konflik komunal di daerah rawan konflik memerlukan penanganan yang efektif. Hal ini sangat penting dilakukan agar penanganan pasca konflik dapat dilaksanakan secara baik dan terarah demi terciptanya kondisi yang kondusif di suatu daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat interaksi dan saling ketergantungan antar pihak-pihak yang tadinya berkonflik, akan semakin membatasi munculnya konflik baru. Munculnya saling pengertian dan berkembangnya norma-norma bersama juga akan dapat mencegah konflik (Tri Ratnawati, 2006).

Salah satu faktor yang dewasa ini mempengaruhi adanya perang/konflik adalah faktor perkembangan teknologi yang mempengaruhi juga dunia militer atau yang dikenal pula dengan *Revolution in Military Affairs* (RMA). Masih terdapat berbagai pandangan terhadap pengertian dari RMA itu sendiri. RMA adalah suatu perubahan dari sistem utama dari pelaksanaan perang yang disebabkan oleh pengaplikasian teknologi baru yang inovatif, yang kemudian dikombinasikan lebih lanjut dengan perubahan doktrin militer dan doktrin operasional serta konsep struktur

organisasi secara drastis, dimana perubahan tersebut di atas secara fundamental merubah karakter dan pelaksanaan dalam operasi militer (Andrew Marshall, 2009).

Kota Ambon merupakan ibu kota propinsi Maluku yang cukup strategis karena Kota ini juga merupakan salah satu kota pelabuhan di kawasan Timur Indonesia. Terdapat banyak warga masyarakat yang berasal dari luar daerah kota Ambon baik dari Jawa, Madura, Padang, Bugis, Buton, Makassar, Papua, Bali dan berbagai macam suku lainnya. Kota Ambon beberapa waktu yang lalu merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang pernah mengalami konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horisontal. Penanganan konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah perlu dikaji lebih mendalam apakah sudah menyentuh kepada akar permasalahan yang ada di wilayah tersebut atau belum. Konsiliasi yang telah dilakukan aparat pemerintah baik sipil maupun militer di kota Ambon pasca konflik antar agama memerlukan tindakan kompeherensif dan keterlibatan segenap pihak. Oleh karena itu maka dibutuhkan suatu komitmen yang kuat serta kerja berkesinambungan dari semua pihak sehingga konflik dan kerusuhan dapat dihindari di masa yang akan datang. Peranan institusi Keamanan Negara terutama dari kalangan militer/TNI sangat diharapkan dapat membantu Pemerintahan Daerah dan juga Kepolisian Negara di daerah ini. Peran militer dibutuhkan untuk tetap dapat menjaga tingkat stabilitas keamanan di wilayah ini agar tetap terpelihara suasana dan rasa aman dari masyarakat.

Muhadjir Effendy (2011) menyatakan bahwa organisasi militer adalah sebuah ikatan persaudaraan dan persekutuan sekaligus alat kekuasaan dan birokrasi. Dengan demikian, ideologi militer dapat dianalisa dari perspektif organisasi persekutuan para prajurit, perspektif ideologi militer sebagai birokrasi politik, atau sebagai suatu pembauran antar keduanya. Pendapat Armos Perlumetter tersebut menguatkan bahwa militer di dalam suatu negara sebenarnya adalah alat kekuasaan dan birokrasi (Muhadjir Effendy, 2011). Militer di negara-negara dunia telah menunjukkan kinerjanya dengan membantu pemerintah yang

berkuasa untuk menjaga keamanan Nasional dan kedaulatan negaranya baik di masa damai maupun pada masa perang.

TNI AD khususnya prajurit KODAM XVI/Pattimura merupakan salah satu organisasi militer/TNI di kota Ambon Propinsi Maluku yang merupakan salah satu instansi yang turut menjaga perdamaian di kota Ambon propinsi Maluku. Keberhasilan dan profesionalisme prajurit Kodam XVI/Pattimura yang telah ditunjukkan di dalam menjaga tingkat stabilitas keamanan yang relatif stabil hingga saat ini tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan. Keberhasilan rekonsiliasi sangat ditentukan oleh adanya semangat membangun rekonsiliasi di wilayah tersebut. Disamping itu keberhasilan melaksanakan perdamaian antar agama yang bertikai merupakan salah satu cerminan profesionalisme aparat TNI AD di dalam melaksanakan tugasnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu diteliti lebih mendalam tentang profesionalisme prajurit TNI AD di Makodam XVI/Pattimura dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal di wilayah Ambon Propinsi Maluku.

Rekonsiliasi yang pernah dilaksanakan di kota Ambon ternyata masih menyimpan benih-benih perpecahan antar sesama anak bangsa. Hal ini dikarenakan belum hilangnya perasaan saling curiga antar sesama warga di wilayah ini. Sentimen antar kampung yang terjadi kadang kala dapat merambat ke arah pertentangan atau konflik antar agama. Di dalam perkembangannya hingga saat ini masih ditemukan adanya konflik antar warga khususnya perselisihan antar kampung di wilayah Ambon dan sekitarnya. Konflik-konflik ini dikhawatirkan akan dapat menyebabkan benih-benih konflik sosial di masa yang akan datang. Kondisi ini menuntut profesionalisme dari kalangan prajurit TNI AD khususnya di Koramil 1504-02 Ambon untuk dapat menjaga situasi stabilitas keamanan yang rawan akan timbulnya kerusuhan/konflik di masa yang akan datang. Penelitian mengenai profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02 XVI/Pattimura dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal ini perlu dilakukan, untuk dapat membuktikan tingkat profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugasnya di kota Ambon Propinsi Maluku.

Pengalaman konflik yang terjadi di masa lalu dan juga sejarah terwujudnya integrasi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara selama ini sangat dipengaruhi oleh adanya potensi kemajemukan Negara Indonesia yang sangat luar biasa. Potensi keberbedaan secara positif diakui sebagai suatu kekayaan khasanah budaya, namun juga menyimpan potensi konflik dan disintegrasi. Tri Ratnawati (2006) menyebutkan konflik Ambon pertama kali meletus pada tanggal 19 Januari 1999 bertepatan dengan umat Islam merayakan hari Idul Fitri. Konflik menjadi berkepanjangan (sekitar satu tahun), meluas, bertambah kompleksitasnya serta berubah menjadi tragedi tragedi yang sangat memilukan. Konflik komunal di Ambon telah memakan korban sekitar 1134 warga sipil dan 18 aparat tewas; gedung pemerintah 35 ; sekolah 20; bank 4; toko 719; masjid 45; gereja 47 ;kendaraan roda dua 128; kendaraan roda empat 198, dan lebih dari 70.000 orang terpaksa mengungsi. Disamping itu kerusuhan Ambon juga telah mengakibatkan perekonomian dan kegiatan pendidikan terganggu, terjadi disintegrasi wilayah dan sosial (wilayah Ambon kini terbelah masing-masing menjadi wilayah Islam, wilayah Kristen dan wilayah netral), serta hilangnya rasa aman masyarakat (Tri Ratnawati, 2006).

Konflik komunal di Ambon terjadi pada kurun waktu tahun 1999 hingga sekitar tahun 2004 secara berangsur angsur dapat diselesaikan oleh pemerintah. Upaya-upaya Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah telah dilakukan dan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Perjanjian Malino II tanggal 12 Februari 2002 yang mempertemukan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh –tokoh adat baik dari pihak Islam maupun Kristen telah dapat mewujudkan suatu perdamaian di wilayah Kota Ambon. Kehidupan ekonomi masyarakat berangsur-angsur pulih karena adanya istilah *baku bae*, yaitu bertemunya warga baik yang beragama Islam maupun Kristen di tempat-tempat seperti pasar baku bae, tempat-tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa lain.

Pada saat konflik Ambon terjadi, kekuatan TNI AD di wilayah ini adalah Korem 174/ Pattimura. Saat itu terdapat pasukan TNI dan Polri yang bertugas mengatasi konflik di Maluku (s.d Februari 2000) telah mencapai 16 batalion, termasuk 3 batalion organik Kodam XVI/Pattimura. Hanya tiga batalyon bertugas mengatasi pertikaian di Maluku Utara. Setiap batalyon kira-kira terdiri atas 700-850 pasukan (Tri Ratnawati, 2006). Tri Ratnawati (2006) juga menyampaikan bahwa Komando dan Pengendalian yang awalnya dipegang oleh Kapolda, setelah adanya liquidasi Korem 174/Pattimura menjadi Kodam XVI/Pattimura pada tanggal 15 Mei 1999 maka Kodam beralih ke Pangdam XVI/Pattimura selanjutnya tanggal 15 Mei menjadi hari lahirnya Kodam XVI/Pattimura.

Kodam XVI/Pattimura pada awalnya merupakan bagian dari Kodam Trikora (saat ini Kodam XVII/Cenderawasih). Kodam XVI/Pattimura ini dibentuk sebagai suatu bentuk kebutuhan organisasi dan bagian dari pengembangan gelar kekuatan dan kemampuan serta postur TNI AD yang di dalamnya juga sebagai ditujukan sebagai solusi di dalam mengatasi konflik yang terjadi di wilayah rawan konflik ini sesuai dengan ancaman yang ada saat itu dan di masa yang akan datang. Di dalam perjalanannya hingga kini, Kodam XVI/Pattimura sebagai Kotama yang tergolong baru di lingkungan TNI AD tentunya memiliki permasalahan dalam berbagai aspek. Kodam yang tergolong baru di jajaran TNI AD yang terbentuk sekitar 16 tahun silam tersebut memiliki sektor wilayah di wilayah Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara. Sektor wilayah ini sedemikian luasnya karena kedua propinsi tersebut berupa wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.807 pulau besar dan kecil termasuk di dalamnya 19 pulau-pulau terluar. Kondisi ini tentu menimbulkan permasalahan dan tantangan yang sangat kompleks dan cukup rumit. Situasi dan kondisi serta tantangan yang dihadapi di daerah Timur Indonesia khususnya di wilayah Kodam XVI/Pattimura hingga saat ini tentunya sangatlah berbeda dengan situasi dan kondisi serta tantangan di Pulau Jawa pada umumnya dan wilayah Indonesia lainnya.

Gelar pasukan yang beroperasi hingga saat ini masih terus dilakukan di beberapa tempat di wilayah kota Ambon meskipun dengan jumlah pos dan personel yang terbatas (\pm 10-15 orang). Saat ini terdapat satu Batalyon Satgas Pam Rahwan di daerah Maluku dari luar organik Kodam XVI/Pattimura dan juga satu Yonif di internal jajaran Kodam XVI/Pattimura. Pasukan yang sedang beroperasi di daerah ini tentunya kerap kali mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi tugas pokoknya dalam sebagai Satgas Pam Rahwan di Ambon. Observasi awal peneliti melihat adanya permasalahan yang paling menonjol yang dialami oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam XVI/Pattimura adalah adanya perbedaan harga-harga barang yang lebih mahal dibandingkan dengan Pulau Jawa pada provinsi lainnya secara umum. Harga-harga bahan makanan pokok dan harga barang-barang lainnya yang dibeli oleh prajurit di wilayah Ambon hingga saat ini relatif sama dengan harga-harga di daerah Papua (Kodam XVII/Cenderawasih) yakni lebih tinggi daripada harga-harga barang di Pulau Jawa. Namun, di sisi lain prajurit di Kodam XVII/Cenderawasih tetap mendapatkan tunjangan kemahalan tiap bulannya yang tentunya bagi prajurit sangat membantu meringankan beban hidup prajurit di daerah tersebut. Sebaliknya prajurit di Kodam XVI/Pattimura tidak mendapatkan tunjangan yang sama. Kodam XVI/Pattimura hingga tahun ke-16 pembentukannya hingga saat ini belum pernah menerima tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan tersebut saat ini masih diterima rekan-rekan prajurit di wilayah Kodam Cenderawasih yang dahulu nota bene merupakan asal dari Kodam XVI/Pattimura dengan kondisi inflasi atau harga-harga barang yang relatif sama.

Observasi awal peneliti terhadap permasalahan lain khususnya permasalahan prajurit yang berada di wilayah Ambon adalah tempat tinggal atau rumah dinas prajurit. Rumah dinas prajurit hingga saat ini masih terbagi/terbelah dalam 2 komunitas besar yaitu rumah dinas yang berada di wilayah Muslim yaitu di daerah Batu Merah dan rumah dinas yang berada di wilayah Kristen yang berada di daerah OSM dan Benteng

Atas. Hal ini merupakan potensi konflik yang dapat saja melibatkan anggota TNI AD di masa yang akan datang. Perumahan dinas yang terbentuk seperti disebutkan di atas itu sangat dimungkinkan terbentuk karena akibat dari adanya konflik masa lalu yang kini telah membelah wilayah Ambon menjadi daerah Islam dan Kristen. Hal ini telah menyebabkan prajurit tinggal di daerah yang terbelah baik di wilayah Islam maupun Kristen. Hal ini tentu berbeda pada perumahan dinas perwira yang tersebar baik di wilayah yang sebagian masyarakatnya beragama Islam maupun Kristen.

Di dalam lingkup TNI AD sendiri dikenal aspek-aspek yang dapat berpengaruh terhadap profesionalisme TNI AD yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor Internal yang bisa menjadi parameter tingkat profesionalisme prajurit di lingkungan TNI AD salah satunya adalah Pembinaan Satuan, sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya *stake holder* dan kebijakan pemerintah tentang pertahanan negara. Penyelenggaraan Pembinaan Satuan dilakukan secara terpadu dan terencana meliputi penentuan kebijakan, strategi, tujuan, perumusan sasaran dan penerapan sistem serta metode pembinaan dengan menggunakan manajemen modern meliputi organisasi, personel, materiil, pangkalan, piranti lunak dan latihan yang didukung anggaran serta hasilnya akan diketahui setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan di seluruh satuan jajaran TNI AD (Bujuklak tentang Pembinaan Satuan TNI AD, 2006).

Pembinaan prajurit TNI AD yang profesional saat ini harus terus dilakukan dengan berbagai hal sehingga semakin hari akan terus dapat menjawab tantangan tugas sesuai tuntutan tugas yang diemban baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu komponen Binsat TNI AD terdapat adanya pembinaan personel yang merupakan pembinaan sumber daya manusia yang diantara fungsinya adalah bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap kesegaran jasmani prajurit. Hal ini penting dilakukan agar dapat mendukung tugas pokoknya dalam bekerja secara profesional.

Ditinjau dari tingkat kesegaran jasmani maka prajurit di Kodam XVI/Pattimura masih belum dapat dikatakan optimal. Berdasarkan hasil tes kesegaran Jasmani yang dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali hasil yang diperoleh belum optimal. Masih terdapat 1.489 prajurit yang belum dapat mencapai target nilai 65 (Laporan Tes Kesegaran jasmani Kodam XVI/Pattimura, 2014). Disisi lain, prajurit Koramil 1504-02/Sirimau Ambon yang merupakan bagian dari Kodim 1504 Ambon Korem 151/Bny Kodam XVI/Pattimura juga masih memiliki tantangan tugas dihadapkan pada ancaman yang masih harus dihadapi.

Adapun tugas-tugas prajurit di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik antara lain adalah melaksanakan kegiatan Pembinaan Teritorial khususnya dengan menggunakan metode Komunikasi Sosial. Komunikasi Sosial yang dilakukan dengan masyarakat diharapkan akan dapat mengeliminir konflik-konflik yang akan terjadi. Kemampuan Komunikasi Sosial prajurit seharusnya dapat mengajak masyarakat untuk bersikap tunduk pada hukum dan dengan sukarela mau menyerahkan senjata api yang masih disimpan oleh penduduk yang digunakan saat konflik dahulu. Namun, pada kenyataanya masih ditemukan oleh peneliti pada saat observasi awal permasalahan pada prajurit di level operasional yang belum dapat melaksanakan tugas Komunikasi Sosial nya dengan baik Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokoknya tersebut. Disisi lain di tengah-tengah penduduk masih terdapat adanya ancaman terhadap masyarakat yang dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan pasca konflik komunal. Ancaman tersebut seharusnya dapat dieliminir oleh prajurit dengan melaksanakan tugas secara profesional khususnya di dalam melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial. Terkait dengan adanya ancaman-ancaman stabilitas pasca konflik komunal maka dapat dilihat adanya potensi ancaman pasca konflik komunal dalam matriks berikut ini :

Tabel.1.1 Matriks potensi ancaman keamanan pasca konflik komunal

NO	POTENSI KONFLIK	KEJADIAN RIIL	DAMPAK
1.	Peredaran Senjata	Masih beredarnya/ ditemukannya senjata api rakitan maupun standar hingga tahun 2014	Adanya kekhawatiran warga jika konflik akan terulang kembali sehingga mempengaruhi Tugas pokok terutama dalam Komunikasi Sosial Prajurit.
2.	Terbelahnya dua bagian besar komunitas pemukiman warga di kota Ambon (daerah komunitas Islam dan daerah komunitas Kristen).	Komunitas pemukiman penduduk di daerah Islam dan Kristen 2004 s.d saat ini.	Masih adanya rasa saling curiga antara sesama warga di kota Ambon.
3.	Perkelahian antar kampung.	Masih terdapat perkelahian antar kampung tgl 11 s.d 12 Sept 2011.	Adanya korban sia-sia di kedua belah pihak.
4.	Budaya minum-minuman keras.	Terjadi hampir di setiap acara pesta atau malam libur.	Adanya perselisihan menimbulkan perkelahian.

(Sumber : Laporan Satuan Kodam XVI/Pattmura)

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah yang saat ini sangat menarik perhatian peneliti untuk diteliti dari profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau kota Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal adalah :

- *Pertama*, Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau kota Ambon belum optimal disebabkan oleh adanya permasalahan-permasalahan baik masalah eksternal maupun internal.
- *Kedua*, Masih ditemukannya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terwujudnya profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau kota Ambon.
- *Ketiga*, Diperlukannya upaya-upaya yang dilakukan prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal secara profesional.

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan diatas maka profesionalisme TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau kota Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sangat menarik untuk diteliti. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas tentunya akan mempengaruhi profesionalisme prajurit TNI AD di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal yang terjadi beberapa tahun yang lalu di wilayah ini. Keberadaan prajurit TNI AD khususnya Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di wilayah Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal di Ambon menjadi sangat penting dalam rangka mendukung Sistem Pertahanan Negara yang berujung pada suksesnya program-program pembangunan Nasional di wilayah ini. Pentingnya profesionalisme prajurit TNI AD di daerah ini bukan hanya sekedar untuk dapat menyelesaikan konflik pada saat konflik itu terjadi. Namun hal yang paling krusial adalah bagaimana prajurit tersebut mampu untuk

memelihara perdamaian yang sudah terwujud dan juga menjaga konsiliasi yang telah dilakukan antara kelompok yang pernah bertikai.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul dalam penelitian ini adalah ” **Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Pasca Konflik Komunal** ”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat berbagai latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah profesionalisme prajurit TNI di Koramil 1504-02/sirimau Ambon belum optimal karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme. Berdasarkan rumusan masalah di dalam penelitian ini maka pertanyaan di dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal secara profesional?

1.3. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Menganalisis bagaimana profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal.

2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon khususnya di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal secara profesional.

Signifikansi penelitian ini adalah tercapainya profesionalisme bagi prajurit TNI AD di Koramil 1504-04/Sirimau dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik dapat tercapai .

1. 4. Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1. Kegunan Teoritik

Bagi Program Magister Terapan Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan Indonesia, diharapkan menambah ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa sebagai bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah yang berkenaan dengan bidang kajian pertahanan negara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk semua yang membacanya dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini baik bagi kalangan akademik, bagi peneliti dan bagi pemerintah. Bagi akademik sebagai pengembangan ilmu strategi pertahanan darat, bagi peneliti pribadi untuk menambah pengetahuan ilmu pertahanan khususnya pada program studi strategi pertahanan darat, serta bagi instansi dan masyarakat umum, seperti yang dimaksud dibawah ini :

1. Bagi akademik.
Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam

mengembangkan konsep-konsep profesionalisme dalam organisasi TNI AD dan dapat menjadi pengetahuan untuk dikembangkan lebih lanjut.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi media dalam mengembangkan pola berfikir secara terstruktur dan sistematis serta memahami profesionalisme TNI AD di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal di kalangan mahasiswa.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan, sehingga pada masa yang akan datang agar dapat merumuskan dan memutuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mewujudkan profesionalisme prajurit TNI AD khususnya di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal pada periode 2010-2015. Obyek penelitian penelitian di dalam kegiatan penelitian ini adalah Koramil 1504-02/Sirimau Ambon. Di dalam penelitian ini, masalah yang akan dianalisa adalah profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal. Profesionalisme prajurit TNI AD di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik sangat tergantung dari kemampuan prajuritnya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adanya kemampuan prajurit TNI AD dalam menggerakkan, mendorong, mendinamisasi dan membentengi TNI AD dari tendensi penyimpangan serta penyalahgunaan baik secara internal maupun eksternal merupakan ciri profesionalisme TNI AD. Penelitian ini dilakukan dengan dibatasi pada kurun waktu antara

tahun 2010-2015. Data yang didapat dari narasumber merupakan data mulai tahun 2010 hingga 2015.

Penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab antara lain :

- Bab I. Pendahuluan. Membahas tentang latarbelakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan, kegunaan dan batasan penelitian, serta sistematika pembahasan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka. Berbagai teori yang berkaitan dengan teori profesionalisme, teori konflik, teori komunikasi dan teori peran
- Bab III. Metode Penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian, tehnik pengumpulan data dan analisa data.
- Bab IV. Analisis Data dan Pembahasan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana profesionalisme prajurit TNI AD, faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya profesionalisme dan upaya yang dilakukan prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal secara profesional.
- Bab V. Simpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka menganalisis dan merumuskan berbagai hasil penelitian yang terkait dengan profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau di kota Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal yang akan dibahas lebih lanjut, maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini digunakan untuk memahami berbagai hal yang berhubungan dengan teori profesionalisme, teori konflik, teori komunikasi dan teori peran. Tinjauan pustaka tersebut diatas berkaitan erat dengan profesionalisme TNI AD di Koramil 1504-02 dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal.

2.1.1 Landasan Teori

Istilah profesional berasal kata *profession* yang berarti pekerjaan (John M.Echols dan Shadili, 1996). Beberapa pakar menyebutkan nilai-nilai profesionalisme merupakan kombinasi atau gabungan dari integritas, disiplin, dan kompetensi. Profesionalisme (*profésionalisme*) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang profesional (Longman, 1987).

2.1.2. Teori Profesionalisme

Penelitian ini menggunakan teori Profesionalisme militer yang diuraikan oleh Samuel Huntington. Sebagai landasan teori dan tinjauan pustaka lainnya maka akan diuraikan beberapa konsep profesionalisme lainnya yang diungkapkan oleh beberapa ahli di bidang profesionalisme.

Menurut Schein,E.H,(1962) Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang

berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Sedangkan profesionalisme menurut Kiki Syahnakri berpendapat bahwa Profesionalisme merupakan “roh” yang menggerakkan, mendorong, mendinamisasi dan membentengi TNI dari tendensi penyimpangan serta penyalahgunaannya baik secara internal maupun eksternal.

Menurut pandangan *Morrow dan Goetz* dalam Snizek, Kerr et al., (1977) Bartol (1979) seperti yang dikutip oleh Kalbers dan Forgy (1995) profesionalisme meliputi lima elemen :

- *Pertama*, pengabdian pada profesi (*dedication*) yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pencerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisi sebagai tujuan bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan totalitas adalah merupakan komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan kepuasan material,
- *Kedua*, Kewajiban sosial (*social obligation*) yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesionalisme itu sendiri, karena adanya pekerjaan tersebut,
- *Ketiga*, Kemandirian (*autonomy demands*) yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesionalisme harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain,
- *Keempat*, Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya dan

- *Kelima*, hubungan dengan sesama profesi (*profesional community affiliation*) yaitu penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan ini. Melalui ikatan profesi ini, profesional membangun kesadaran profesinya. Walaupun indikator profesionalisme tersebut belum diuji secara luas, namun beberapa penelitian empiris mendukung bahwa profesionalisme adalah bersifat multidimensi walaupun tidak selalu identik untuk diterapkan pada anggota kelompok yang berbeda.

Muhajir Effendi (2011) menyebutkan bahwa menurut pendapat lainnya dari Morris Janowits sebagaimana dikutip oleh Segal dan Schwarz yang mendefinisikan pengertian profesionalisme sebagai suatu keahlian khususnya diperoleh melalui latihan yang intensif (*special skill acquired thought intensive training*), adanya standar etik dan kepribadian (*standards of ethics and performance*), rasa kebersamaan kelompok (*a sense of group identity*) dan sistem administrasi yang baik (*system of internal administration*).

Di dalam jurnal *British Journal of Educational Studies*, p. 315 dijelaskan bahwa profesionalisme menurut Hoyle adalah sebagai berikut “ *Hoyle explained professionalism as those strategies and rhetoric employed by members of an occupation in seeking to improve status, salary and conditions.* Di dalam terjemahan dapat diartikanHoyle menjelaskan bahwa profesionalisme adalah sebagai sebuah strategi-strategi dan retorika yang dikerjakan oleh para anggotanya di dalam sebuah pekerjaan tersebut di dalam rangka mencari sesuatu untuk dapat meningkatkan status, penghasilan dan keadaan-keadaan yang mereka inginkan.”

Sedangkan menurut Troman (1996) seperti yang disampaikan dalam Linda Evans (2008) mengatakan tentang profesionalisme sebagai berikut “*professionalism is not as an absolute or an ideal, but as a socially*

constructed, contextually variable and contested concept.” Dapat diartikan bahwa profesionalisme adalah tidak sebagai sesuatu yang absolut atau sesuatu yang ideal, akan tetapi adalah sebagai konstruksi/bangunan sosial, variabel kontekstual dan konsep yang telah diuji.

Melihat pengertian profesionalisme diatas dapat terlihat bahwa profesionalisme dapat diperoleh jika seseorang atau organisasi memiliki elemen-elemen dari profesionalisme yang telah disebutkan diatas. Terkait dengan penanganan pasca konflik komunal maka ada beberapa elemen profesionalisme lainnya yang harus dimiliki oleh prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga stabilitas pasca konflik komunal.

Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer merupakan suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun dia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarki birokrasi (Peter Balu dan Richard Scoot, 1962, hlm.54). Militer Profesional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan-keamanan, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata, setia pada negara bukan kepada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat dan punya etika militer yang kuat. Etika ini mementingkan ketertiban hierarki dan pembagian tugas serta pengakuan atas *nation-state* sebagai bentuk tertinggi organisasi politik (Armos Perlumetter, 2009).

Ilmuwan Amerika Serikat Samuel P. Huntington (1957) berpandangan bahwa perubahan korps perwira militer dari bentuk “penakluk” (*warrior*) menjadi kelompok profesional ditandai dengan bergesernya nilai dari “tentara pencari keuntungan” menjadi “tentara karena panggilan suci” contohnya pengabdian kepada Negara. Huntington memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer, menurutnya memiliki tiga ciri sebagai berikut :

- *Pertama*, Keahlian (*Expertise*).

Suatu kekuatan militer memerlukan pengetahuan yang mendukung untuk mampu mengorganisir, merencanakan, dan mengarahkan aktivitasnya baik dalam keadaan perang maupun damai.

- *Kedua*, Tanggung jawab sosial yang khusus (*Social Responsibility*).

Seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi yang terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tanggung jawab pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat itu seorang perwira seolah-olah “milik pribadi” komandannya dan harus setia kepadanya. Pada masa profesionalisme seorang perwira berhak mengoreksi komandannya jika sang komandan bertentangan dengan kepentingan negara (*national interest*).

- *Ketiga*, Karakter korporasi (*corporate character*) yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat.

Berbeda dengan kelompok profesional yang lain, korps perwira militer merupakan suatu “birokrasi profesional” yang anggota-anggotanya mengabdikan pada birokrasi negara, tapi sebagai suatu satuan dalam birokrasi negara korps perwira merupakan unit sosial yang otonom, yang memiliki kemandirian dalam birokrasi, lembaga pendidikan, jurnal, asosiasi, kebiasaan dan tradisi. Ketiga ciri tersebut di atas melahirkan yang disebut oleh Huntington “The Military Mind” yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara. Inti *The Military Mind* adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil. Huntington menganggap intervensi militer dalam politik sebagai tanda adanya pembusukan politik (*political decay*).

Pendapat lainnya ditinjau dari perspektif militer Sarkesian seperti yang disampaikan dalam Muhadjir Effendy (2015) mendefinisikan

profesional sebagai berikut : “*Professional are motivated by a sense of service and responsibility to society. Military professionals are expected to be prepared to give their lives to serve the profession and state*”. Menurutnya, seorang militer yang profesional akan mencurahkan segala daya dan pikiran untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran yang ditentukan oleh Negara dalam bidang kemiliteran, serta betul-betul menyenangkan profesinya.

Satrio Arismunandar (2013) berpendapat bahwa dalam konteks militer Indonesia, profesionalisme TNI menurut penjabaran resmi diukur dari tiga hal, yaitu: kompetensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. Disamping itu menurutnya ideologi juga memegang peranan penting di dalam profesionalisme militer seperti halnya di Negara Jerman. Tidak ada negara yang memiliki pengalaman yang begitu beragam dan luas dalam hubungan sipil-militer seperti di Jerman. Hubungan sipil-militer di Jerman mengalami perubahan, mulai dari periode kerajaan, Perang Dunia I, republik, dan di bawah Nazi. Satrio Arismunandar (2013) juga berpendapat bahwa profesionalisme TNI bukanlah produk jadi yang siap pakai dan bisa diperoleh begitu saja. Profesionalisme TNI adalah suatu proses, suatu kondisi dinamis yang harus terus diperjuangkan, baik oleh jajaran TNI sendiri maupun oleh para pemangku kepentingan lain (Perjalanan Panjang Profesionalisme TNI, 2014.)

Syarifudin Tipe (2012) menyatakan bahwa profesionalisme militer secara umum termasuk profesionalisme TNI akan sangat tergantung pada tiga dimensi yaitu : Sistem, SDM dan Alat (alutsista). Dari ketiga dimensi tersebut kualitas SDM TNI merupakan dimensi terpenting operasional dalam bentuk eksistensi dua dimensi lainnya, yaitu *the man behind the gun* dan *the man behind he system*. Artinya mutu profesionalisme TNI sangat tergantung pada kualitas SDM TNI.

Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 menyatakan bahwa jati diri TNI yang keempat adalah Tentara Profesional. Tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti

kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi (UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia).

Bila dilihat dari berbagai pengertian dari profesionalisme diatas maka sudah seharusnya tentara Indonesia memiliki kemampuan yang setara dan setingkat dengan negara lain serta memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan tingkat dukungan yang diperolehnya sesuai dengan amanah Undang-Undang. Undang-undang yang ada telah menegaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang(OMSP). Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI Angkatan Darat sebagai bagian integral dari TNI mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara di darat dan mempertahankan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan wajib militer bala darat bagi warga negara yang diatur dengan Undang Undang.

Berbicara tentang profesionalisme TNI AD, maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang yang mengatur peran, tugas dan fungsi dari TNI. Apabila mengacu kepada UU no.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maka di dalam tugas pokoknya telah jelas menyebutkan bahwa TNI bertugas pokok untuk melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itulah maka TNI AD memiliki tugas untuk mengamankan keselamatan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Di dalam UU No.34 Tahun 2004, TNI memiliki tugas pokok Operasi Militer untuk perang (OMP) dan juga Operasi militer selain perang (OMSP). Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UU No.34 Tahun 2004 dilakukan dengan :

- a. Operasi Militer untuk perang.
- b. Operasi Militer selain perang.
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - 3) Mengatasi aksi terorisme.
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan.
 - 5) Mengamankan objek vital Nasional yang bersifat strategis.
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Berdasarkan Tugas TNI tersebut diatas, maka pada poin ke 9 dan 10 dapat dilihat salah satu tugas OMSP TNI adalah pemberian perbantuan kepada Pemerintah Daerah dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Di dalam implementasinya TNI juga memiliki tugas untuk menangani konflik sosial ataupun konflik komunal yang menyebabkan hilangnya rasa kemanusiaan terhadap korban yang terkena dampak konflik tersebut. TNI bertugas untuk memberikan perbantuan baik kepada Pemerintah daerah maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam turut serta menjaga stabilitas keamanan negara.

Di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial menyebutkan bahwa TNI dapat diminta untuk bertugas dalam melaksanakan penanganan konflik sosial. Di dalam Undang-Undang penanganan Konflik Sosial tersebut, pemerintah daerah dapat meminta TNI untuk membantu Pemerintah daerah di dalam menanganani konflik sosial. Di dalam UU Penanganan Konflik Sosial pada pasal 33 Undang-undang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan bahwa dalam Status Keadaan Konflik skala Kabupaten/kota, bupati atau walikota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah.

Demikian selanjutnya jika skala konflik bersifat provinsi maka Gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah. Undang-undang ini meskipun memiliki jalur birokrasi yang cukup panjang, namun sudah mengatur peran TNI di dalam menangani konflik sosial di Negara kita. Peran TNI di dalam penanganan konflik sosial telah diatur pula di dalam Perpang TNI nomer 1 Tahun 2014 tentang Peran Teritorial TNI di dalam penanganan konflik sosial. Pemerintah pun saat ini telah mengeluarkan PP no. 2 tahun 2015 yang telah mengatur peran TNI dalam penanganan konflik sosial sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomer 7 tahun 2012 tentang UU penanganan konflik sosial.

Di dalam internal TNI sendiri, Tentara profesional sebenarnya telah diwadahi di dalam doktrin TNI Tri Darma Eka Karma. Di dalam doktrin TNI disebutkan jati diri TNI terdiri dari 4 hal yaitu : Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. Adapun definisi dari Jati diri TNI tersebut seperti yang tercantum dalam doktrin Tri Darma Eka Karma dijelaskan sebagai berikut :

- *Pertama, Tentara Rakyat* yaitu tentara yang berasal dari rakyat Indonesia yang mulanya merupakan rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI. TNI mengemban amanat perjuangan rakyat, berasal dari rakyat dan berjuang untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
- *Kedua, Tentara Pejuang*, yaitu Tentara yang berjuang untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengawal ideologi Pancasila, melindungi kepentingan nasional dalam rangka mencapai Tujuan dan cita-cita Nasional dengan tidak mengenal menyerah di dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
- *Ketiga Tentara Nasional*, yaitu Tentara Kebangsaan Indonesia bukan tentara kedaerahan, suku, ras atau golongan agama tetapi tentara yang bertugas demi kepentingan negara dan bangsa Indonesia.
- *Keempat Tentara Profesional*, yaitu tentara yang mahir dan terampil dalam melaksanakan tugasnya karena dilatih, dididik, diperlengkapi secara baik dan dijamin kesejahteraannya, mematuhi kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum yang adil baik dalam ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan uraian tentang konsep-konsep atau teori tentang profesionalisme diatas maka Tentara profesional di Indonesia sama halnya dengan tentara profesional di negara negara manapun tentunya dituntut untuk mahir di dalam menggunakan peralatan militer. Militer dalam hal ini tentara profesional juga harus mahir di dalam bergerak dan juga mahir di dalam menggunakan menggunakan alat tempur. Tentara

profesional juga dituntut harus mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa profesionalisme militer yang pada awalnya adalah bertujuan untuk mencari keuntungan maka pada era modern saat ini telah berubah yakni bertujuan untuk tujuan suci seperti halnya mengabdikan kepada negara. Di era dunia yang kian terbuka saat ini maka dapat dilihat profesionalisme militer Indonesia khususnya prajurit TNI AD saat ini tengah mengarah kepada tentara profesional. Hal ini lazim untuk dicapai seperti halnya di negara-negara lainnya di dunia. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan di dalam melihat konteks profesionalisme militer di dalam maupun di luar negeri namun pada hakikatnya profesionalisme militer di negara-negara dunia memiliki tugas suci untuk menjaga kedaulatan Negara dan keutuhan bangsanya.

Di dalam penelitian ini penjelasan dari Samuel Huntington tentang profesionalisme akan digunakan sebagai teori utama untuk menganalisis masalah penelitian karena penjelasan tentang aspek-aspek dalam teori tersebut dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui suatu analisis dan konsep lainnya dalam bab ini digunakan sebagai teori dan konsep pendukung untuk menganalisis masalah. Penjelasan tentang teori dan konsep pendukung untuk melengkapi analisis masalah penelitian dalam rangka memperoleh jawaban atas penelitian dalam rangka memperoleh jawaban atas penelitian.

Terkait dengan profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas pasca konflik komunal maka prajurit seharusnya memiliki berbagai ciri-ciri yang melandasi profesionalisme militer tersebut baik dari segi keahlian, tanggung jawab sosial maupun esprit de corps. Prajurit profesional juga diharapkan dapat mencurahkan segala kemampuannya serta

menyenangi pekerjaannya sehingga patut untuk dapat dikatakan profesional.

2.1.3. Teori Konflik

Dalam penelitian ini diperlukan teori konflik untuk menggali dan menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan penelitian. Teori Konflik dipilih terkait dengan relevansinya dengan teori Profesionalisme. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah diuji oleh konflik baik berupa konflik vertikal maupun konflik horisontal. Konflik-konflik yang ada telah diselesaikan oleh Pemerintah dengan berbagai cara sehingga berujung kepada adanya perdamaian. Perdamaian yang mapan dan berkelanjutan (*sustainable peace*) pasca konflik merupakan kewajiban pemerintah dan seluruh masyarakat. (Bambang Dharmono, 2005).

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan (Wikipedia, 2011).

George Simmel dalam Novri Susan (2009) memiliki asumsi yang sifatnya realis dan interaksionalis. Simmel berpendapat bahwa ketika individu menjalani proses sosialisasi mereka pada dasarnya pasti mengalami konflik. Ketika terjadinya sosialisasi terdapat dua hal yang mungkin terjadi yaitu, sosialisasi yang menciptakan asosiasi (individu berkumpul sebagai kesatuan kelompok) dan disosiasi (individu saling bermusuhan dalam satu kelompok). Simmel menyatakan pula bahwa unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi adalah sebab-sebab

konflik. Simmel berargumen ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik menciptakan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran internal.

Dari teori-teori diatas dapat dilihat bahwa permusuhan timbal balik tersebut mengakibatkan terbentuk stratifikasi dan divisi-divisi sosial, yang pada akhirnya akan menyelamatkan dan memelihara sistem sosial. Disamping itu dengan mengacu kepada teori konflik maka sangat diperlukan adanya stabilisasi yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Demikian juga halnya yang terjadi di wilayah kota Ambon, Propinsi Maluku maka penanganan pasca konflik sangat diperlukan stabilisasi agar konflik dapat dihindarkan lagi di masa-masa yang akan datang. Paling tidak konflik akan dapat di *manage* agar tidak membesar menjadi suatu kerusuhan sosial yang dapat menyebabkan instabilitas di lingkungan masyarakat.

Dewasa ini di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) jenis konflik yaitu konflik internasional, konflik vertikal, dan konflik komunal atau disebut juga konflik horisontal. Konflik komunal adalah sengketa dalam masyarakat baik dari aspek etnis, agama, dan atau hal-hal sejenis. Konflik yang terjadi di Ambon baik pada kurun waktu 1999 s.d 2000 yang lalu maupun konflik berskala kecil yang baru saja terjadi pada tahun 2011 tentunya dapat dikategorikan sebagai konflik komunal. Konflik dapat terjadi apabila terdapat dua kepentingan yang berbeda. Pengertian konflik mempunyai asosiasi perbedaan, pertentangan, kekerasan, benturan dan ketegangan yang menyimpang (*peyoratif*). Meliala (2002) berpendapat bahwa “konflik dalam konteks perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu model transformasi masyarakat melalui pola silang menegasi antara elemen-elemen yang sudah ada dan hidup di masyarakat. Sedangkan Kusnadi (2001) menyebutkan bahwa segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonis (berlawanan, bertentangan atau berseberangan)”. Perbedaan, kesenjangan dan kelangkaan kekuasaan, kelangkaan posisi dan posisi sumber daya. Menurut Fisher dkk. (2000), terdapat 5 tahapan konflik yaitu :

- *Pertama, Pra konflik*, yaitu periode yang mengandung suatu ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga menimbulkan konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
- *Kedua, Konfrontasi*, yaitu tahap dimana konflik semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya telah terjadi di antara kedua pihak. Setiap pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan, mungkin pula mencari sekutu, dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung pada masing-masing pihak.
- *Ketiga, Krisis*, merupakan puncak konflik. Ketika ketegangan dan/atau kekerasan yang paling hebat. Dalam konflik skala besar, tahap ini merupakan periode perang, dimana orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.
- *Keempat, Akibat*, yaitu sesuatu yang timbul akibat krisis. Satu pihak mungkin melakukan gencatan senjata (jika perang terjadi). Pihak yang lain mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Apapun

keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan ada penyelesaian.

- *Kelima, Pasca konflik*, Yaitu tahap dimana pada akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah lebih normal di antara kedua pihak. Namun, jika masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tersebut tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

2.1.3.1. Manajemen Konflik.

Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif (Ross, 1993). Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Menurut pendapat ahli lainnya Fisher dkk (2001) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan. Dan dapat digambarkan sebagai berikut :

- *Pertama, Pencegahan Konflik (conflict prevention)*, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.

- *Kedua*, Penyelesaian Konflik (*conflict solution*), bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.
- *Ketiga*, Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
- *Keempat*, Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Di dalam pengondisian konflik dikenal ada beberapa macam konsep di dalam pengondisian konflik. Konsep-konsep prapengondisian konflik, antara lain :

- *Pertama*, Akomodasi, konflik diredam/ditata dengan cara mengakomodir berbagai macam kepentingan dari orang-orang yang berkonflik sehingga setiap pihak merasa sama-sama diuntungkan. Kusnadi (2001) berpendapat bahwa gaya ini akan dipaksakan kepada pihak yang berkonflik guna mengakui kemenangannya atau kekalahannya secara jantan dan sehat.
- *Kedua*, Kolaborasi, konflik diasumsikan akan semakin berkurang apabila ada kerja sama antara masing-masing kelompok yang berkonflik dengan cara menyepakati kepentingan bersama. Menurut Kusnadi (2001) dalam hal penyelesaian kolaborasi, pihak yang berkonflik diajak ke meja perundingan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Mereka yang berkonflik diajak menyelesaikan sendiri apa yang menjadi keinginannya.
- *Ketiga*, *Avoidance* (menghindari), konflik ditata atau dikendalikan agar tidak saling bentrok satu sama lainnya. Hal ini perlu untuk menghindarkan terjadinya bentrokan agar tidak

semakin meluas. Misalnya, ketika terjadi aksi demonstrasi di kantor KPU antara kelompok yang pro dan kontra atas hasil Pilpres Tahun 2014 yang lalu, maka yang perlu dilakukan adalah membatasi atau membagi waktu sehingga kedua kelompok yang saling bertentangan tersebut tidak bertemu di jalanan.

- *Keempat*, Kompetisi, berkonflik dalam sistem kompetisi. Artinya, konflik tidak terjadi dalam konteks terbuka dan tanpa aturan, tetapi ada aturan mainnya, yakni dalam sistem kompetisi. Konflik dijaga pada tingkat tertentu karena semua permainan bermain pada level yang sama (*level of playing field*).

Manajemen konflik dapat dikatakan pula sebagai upaya pengendalian, mengatur, atau mengelola agar konflik tidak berpotensi dan menjadi padam. Manajemen konflik merupakan upaya untuk mengatur atau mengelola konflik. Berbeda dengan resolusi konflik yang bertujuan untuk memadamkan konflik, manajemen konflik berupaya untuk mengelolanya. Manajemen konflik bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena konflik tidak dapat benar-benar dihilangkan, maka yang perlu dilakukan adalah menatanya atau mengendalikannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

2.1.3.2. Resolusi Konflik.

Resolusi konflik adalah istilah kompeherensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan dan struktur konfliknya telah dirubah (Hugg Miall, Ramsbotham, Oliver, dan Woodhouse Tom, 2002). Konflik hanya dapat dieliminir agar tidak menimbulkan dampak negatif karena konflik sulit dihindari, dicegah atau diatasi sepenuhnya. Pada konflik antar pribadi dapat diselesaikan melalui pengabaian, penindasan dan resolusi. Pengabaian berarti membiarkan konflik berdampak positif maupun negatif tidak ada pengaruhnya bagi individu yang berkonflik. Pada penindasan, sifatnya hanya untuk memperkecil dampak negatif dari konflik tetapi tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Sedangkan pada resolusi, ditujukan untuk menghentikan atau menyelesaikan konflik. Secara teoritis konflik seharusnya (bisa) diakhiri apabila tujuan konflik telah tercapai, bila telah terdapat mekanisme pencapaian tujuan yang lebih efektif ketimbang konflik dan bila konflik nyata-nyata gagal dalam mencapai tujuan pihak-pihak yang berkonflik. Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik (baik sosial, politik dan ekonomi) pada umumnya serta mengubah kemauan melakukan kekerasan menjadi kekuatan yang positif.

Untuk meredam konflik diperlukan suatu sinergitas dari berbagai unsur dan komponen di dalam masyarakat. Peran dari berbagai komponen masyarakat tentulah sangat dibutuhkan meredam konflik . Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), majelis kode etik dan sebagainya adalah yang memiliki kemampuan untuk meredam terjadinya konflik dan bukan hanya ketua RT, ketua RW, Camat, Kapolsek, Danramil, Kapolres, Bupati/Walikota, Gubernur/Kapolda dan sebagainya.

Dalam mengatasi konflik perlu terdapat pengurangan prasangka, untuk menghindari terjadinya perasaan diskriminatif baik antar individu, kelompok maupun state/negara, sehingga dapat mengurangi ketegangan

diantara mereka. Adapun dimensi-dimensi dari dinamika konflik yang relevan menurut Fisher, et al (2000) sebagai berikut :

- *Pertama*, Prasangka, opini tentang sesuatu, seseorang atau suatu kelompok yang terbentuk terlalu dini, tanpa alasan yang baik atau pengetahuan atau pengalaman yang cukup.
- *Kedua*, Stereotip, sebagai gambaran yang digeneralisir dan tercipta karena prasangka terhadap suatu kelompok tertentu dan selalu disederhanakan sehingga seseorang memandang seluruh anggota kelompok itu memiliki sifat pembawaan tertentu (biasanya yang negatif). Contoh orang Batak/Makasar yang dinilai oleh sementara pihak sebagai memiliki sifat yang kasar.
- *Ketiga*, Diskriminasi, perilaku (biasanya negatif) yang disebabkan oleh prasangka dan stereotip terhadap suatu kelompok atau kelompok-kelompok tertentu.

Dari ketiga dimensi-dimensi tersebut, merupakan sesuatu yang dapat muncul baik secara sadar maupun tidak sadar di masyarakat. Apabila dibiarkan maka yang timbul adalah diskriminasi akibat dari adanya prasangka dan stereotip yang diberikan oleh masyarakat. Apabila dibiarkan maka yang timbul adalah diskriminasi akibat dari adanya prasangka dan stereotip yang diberikan oleh masyarakat kepada kelompok/golongan tertentu. Guna mengatasinya, dilakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada terbentuknya suatu rekonsiliasi dan fasilitasi dialog, diantara para pihak yang berkonflik. Hal ini berguna untuk mengembangkan perdamaian yang dapat bertahan pada jangka waktu yang panjang.

Johan Galtung (2014) dalam Jurnal Jurnal Pertahanan Maret 2014 Volume 4 No.1; Unhan memperkenalkan pendekatan perdamaian dalam resolusi konflik. Pertama, pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*), yaitu upaya untuk mengurangi atau menghentikan kekerasan melalui intervensi yang dilakukan oleh pihak penengah, umumnya dilakukan oleh militer.

Kedua, Penciptaan perdamaian (*peace making*) yaitu upaya untuk menciptakan kesepakatan antar pihak yang bertikai, baik melalui mediasi, negosiasi, arbitrase maupun mediasi. Ketiga, pembangunan perdamaian (*peace building*) yaitu upaya rekonstruksi pembangunan sosial ekonomi pasca konflik untuk membangun perubahan sosial secara damai. Dengan tiga tahap ini, diharapkan konflik bisa terselesaikan sampai ke akar masalah, sehingga di masa mendatang konflik tersebut tidak pecah kembali.

Dari uraian diatas maka jelas bahwa konflik memiliki eskalasi atau tahapan-tahapan konflik. Oleh karena itu di perlukan adanya penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga konflik tidak timbul atau muncul kembali atau dengan kata lain pasca konflik tidak menjadi konflik kembali. Demikian juga halnya dengan resolusi konflik di wilayah kota Ambon Propinsi Maluku maka sangat diperlukan prajurit TNI AD yang mampu untuk menjadi penengah di dalam penyelesaian konflik. Terkait pula dengan peran Teritorialnya di dalam penanganan konflik sosial, TNI AD harus mampu melaksanakan membangun perdamaian melalui komunikasi sosialnya terhadap masyarakat secara efektif sehingga akan dapat terbentuk rekonsiliasi dan fasilitasi dialog diantara pihak yang berkonflik khususnya di kota Ambon.

2.1.4. Teori Stabilitas Keamanan

Teori pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang stabilitas keamanan. Stabilitas dapat dijelaskan atau diartikan secara harfiah sebagai suatu kondisi kemantapan, kestabilan dan ketenangan. Matori Abdul Jalil (2012) menyatakan bahwa stabilitas keamanan nasional adalah suatu kondisi kemantapan dan kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman (*human security*). Di dalam Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa “....kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....” Alinea keempat dalam UUD 1945 tersebut menunjukkan 3 unsur yang harus dilindungi keamanannya yakni pemerintah negara (negara), tumpah darah (wilayah) dan bangsa (warga negara). Oleh karena itu sudah selayaknya seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman berupa stabilitas keamanan di lingkungannya masing-masing.

Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan ketakutan”. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) dari luar (Syawal Endless, 2014). Disamping itu Walter Lipmann berpendapat bahwa “suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya keluar sebagai pemenang.

Di dalam kolom keamanan nasional *Encyclopedia of the Social Science* mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai eksternalnya dari ancaman luar. Oleh karenanya maka stabilitas keamanan hanya dapat diperoleh apabila masyarakat merasa bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan ketakutan. Untuk mewujudkan kondisi stabilitas keamanan yang mantap baik di dalam negeri maupun di kawasan maka diperlukan adanya keamanan komprehensif (*security comprehensive*). *Comprehensive Security* sejatinya lebih memperhatikan keamanan negara dan rezim dari pada rakyat yang menjadi pusat perhatian keamanan manusia. Karena itu, agar mampu bersinergi dengan keamanan manusia, keamanan komprehensif harus diperluas secara vertikal ke *who should protected against such threats?* dengan menempatkan individu dan komunitas sebagai pusatnya (Acharya Amitav, hal.453-460).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang baik maka sangat diperlukan adanya keamanan

yang dilakukan secara komprehensif. Terkait dengan profesionalisme prajurit TNI AD dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal maka prajurit TNI AD sebagai anak bangsa harus dapat menggunakan nilai-nilai kearifan local/daerah untuk menyelesaikan konflik dalam menjaga stabilitas keamanan.

2.1.5. Teori Komunikasi

Teori lainnya yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori Komunikasi. Di dalam berkomunikasi sangat erat kaitannya dengan Koordinasi. Koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian dan kesederhanaan berbagai inter dan antar instansi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi (Usman, 2011, hal.437).

Berdasarkan pengertian koordinasi diatas maka koordinasi antar instansi di kota Ambon sangat di perlukan di dalam terjadinya keselarasan dan keserasian sehingga dapat diciptakan suasana kondusif agar stabilitas keamanan dapat dicapai. Dialog-dialog dan komunikasi dengan masyarakat akan menimbulkan adanya keterbukaan masyarakat tentang potensi konflik di wilayahnya.

Di sisi lain Komunikasi juga berperan penting di dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan pasca konflik. Profesionalisme militer dapat dipengaruhi oleh kemampuannya di dalam melaksanakan komunikasi dengan masyarakat. Menurut Berger dan Chafee (1987) Ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan terhadap produksi, proses dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang.

Wilbur Schramm dalam Tommy Suprpto (2009) menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (*sharing process*). Schramm menguraikannya demikian: Komunikasi berasal dari bahasa Latin

communis yang berarti umum (*common*) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (*communes*) dengan seseorang, yaitu kita sedang berusaha berbagi informasi, ide atau sikap. Misalnya saya sedang berkomunikasi dengan pembaca untuk menyampaikan ide bahwa hakikat sebuah komunikasi sebenarnya adalah usaha membuat penerima atau pemberi komunikasi memiliki pengertian/ pemahaman yang sama terhadap pesan tertentu (Tommy Suptpto,2009)

Teori Komunikasi pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh prajurit TNI khususnya TNI AD di dalam melaksanakan tugasnya. Komunikasi prajurit dibutuhkan di dalam menerapkan suatu komunikasi baik komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, ataupun komunikasi massa. Teori komunikasi berguna bagi prajurit untuk menjelaskan dan memberikan suatu informasi terhadap objek-objek komunikasi dan agar supaya para masyarakat bisa menyerap dengan sangat apa yang disampaikan oleh prajurit TNI AD. Adapun yang sangat dibutuhkan dalam komunikasi termasuk dalam menerapkan teori komunikasi adalah komunikator, media, pesan, pemirsa dan umpan balik. Dari kesekian element komunikasi yang paling banyak mempunyai peran penting dalam proses berkomunikasi adalah seorang komunikator jika seorang komunikator handal maka umpan baliknya akan tercapai dengan sangat baik. Hal yang paling penting di dalam teori komunikasi adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi tersebut dengan baik dan jelas. Di dalam hal ini apabila dikaitkan dengan salah satu metode Binter TNI AD, yaitu Komunikasi Sosial maka peran prajurit TNI AD mejadi sangat penting. Peran Komunikasi Sosial prajurit TNI AD di dalam melaksanakan komunikasi sosial dengan baik diharapkan akan dapat menjaga tetap terpelihara serta terjaganya nya stabilitas keamanan pasca konflik.

2.1.6. Teori Peran

Barbara dalam Fadly dalam Bayu (2008) menyatakan bahwa peran adalah “seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu (menurut Barbara, sebagaimana dikutip dalam Fadly, 2008, Bayu 2013)".

Soejono Soekanto (1982) menyatakan bahwa Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon, maka peran prajurit sangatlah perlu dilakukan sebagai bentuk tingkah laku sesuai dengan kedudukannya di dalam struktur sosial masyarakat. Disamping itu kegiatan prajurit TNI ini dilakukan sebagai bentuk pemosisian TNI AD di dalam masyarakat. Pemosisian ini dilakukan dalam rangka upaya untuk menjaga kondisi stabilitas keamanan yang saat ini relatif stabil pasca konflik dapat dipertahankan oleh prajurit tersebut.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti mengadakan perbandingan dengan berapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada relevansinya dengan profesionalisme.

2.1.6.1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulisttyo (2008) yang meneliti tentang *Profesionalisme Aparatur Pemerintah Studi Kasus Responsifitas dan Inovasi Aparatur di Desa Sumber Kabupaten Rembang*. Penelitian ini meneliti tentang profesionalisme aparatur pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya baik melalui kajian telaah pustaka maupun analisis data diperoleh bukti adanya faktor lain yang berpengaruh cukup besar terhadap profesionalisme aparatur dilihat dari responsifitas dan

inovasi aparatur pemerintah di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yaitu budaya *formalism*. Budaya tersebut memperlihatkan aparatur pemerintah cenderung bekerja sesuai aturan-aturan formal yang telah ditentukan sebelumnya, adat kebiasaan yang turun temurun selalu dilakukan oleh aparatur sebelumnya dan berpedoman pada prosedural yang berlaku. Ketidakberanian aparat untuk mendobrak kebiasaan tersebut karena ketakutan dicap sebagai “pemberontak” menjadikan aparatur pemerintah cenderung menjadi kurang kreatif, responsif, dan inovatif yang pada akhirnya menghambat profesionalisme aparatur pemerintahan daerah tersebut.

2.1.6.2. Penelitian yang dilakukan oleh Barnas (2012) yang meneliti tentang *Implementasi Profesional Military Education dalam meningkatkan Kualitas Profesionalisme TNI (Studi Kasus di Universitas Pertahanan Indonesia)*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik melalui kajian pustaka maupun analisis data diperoleh kesimpulan *bahwa Profesional Military Education (PME)* telah digunakan di berbagai Negara maupun di Lembaga Pendidikan Pengembangan Umum di TNI AU maupun TNI AL. Empat aspek di Unhan menjadi acuan untuk bangunan kurikulum di Instansi lainnya sehingga dapat menjadi model dalam penyelenggaraan PME sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme Perwira TNI.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian terletak kepada fokus penelitian yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang profesionalisme. Di dalam hal ini peneliti akan meneliti profesionalisme prajurit TNI pada masa pasca konflik di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon. Adapun perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan di dalam menganalisa masalah penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan teori utama Profesionalisme untuk menganalisa Profesionalisme prajurit TNI AD di dalam menjaga

stabilitas keamanan pasca konflik komunal. Teori lainnya yang digunakan oleh peneliti adalah teori konflik (termasuk di dalamnya teori manajemen konflik dan resolusi konflik), teori/konsep yang terkait dengan stabilitas keamanan teori komunikasi dan teori peran untuk menganalisis profesionalisme prajurit di kesatuan tersebut.

2.2. Kerangka Pemikiran.

Kadar profesionalisme prajurit TNI AD dapat dilihat dari seberapa besar anggota TNI AD mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan optimal. Profesionalisme TNI AD dapat memiliki paling tidak 3 (tiga) ciri yang juga dimiliki oleh militer negara lain. Menurut Huntington memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer, menurutnya memiliki tiga ciri sebagai berikut :

- *Pertama, Keahlian (Expertise).*

Suatu kekuatan militer memerlukan pengetahuan yang mendukung untuk mampu mengorganisir, merencanakan dan mengarahkan aktivitasnya baik dalam keadaan perang maupun damai.

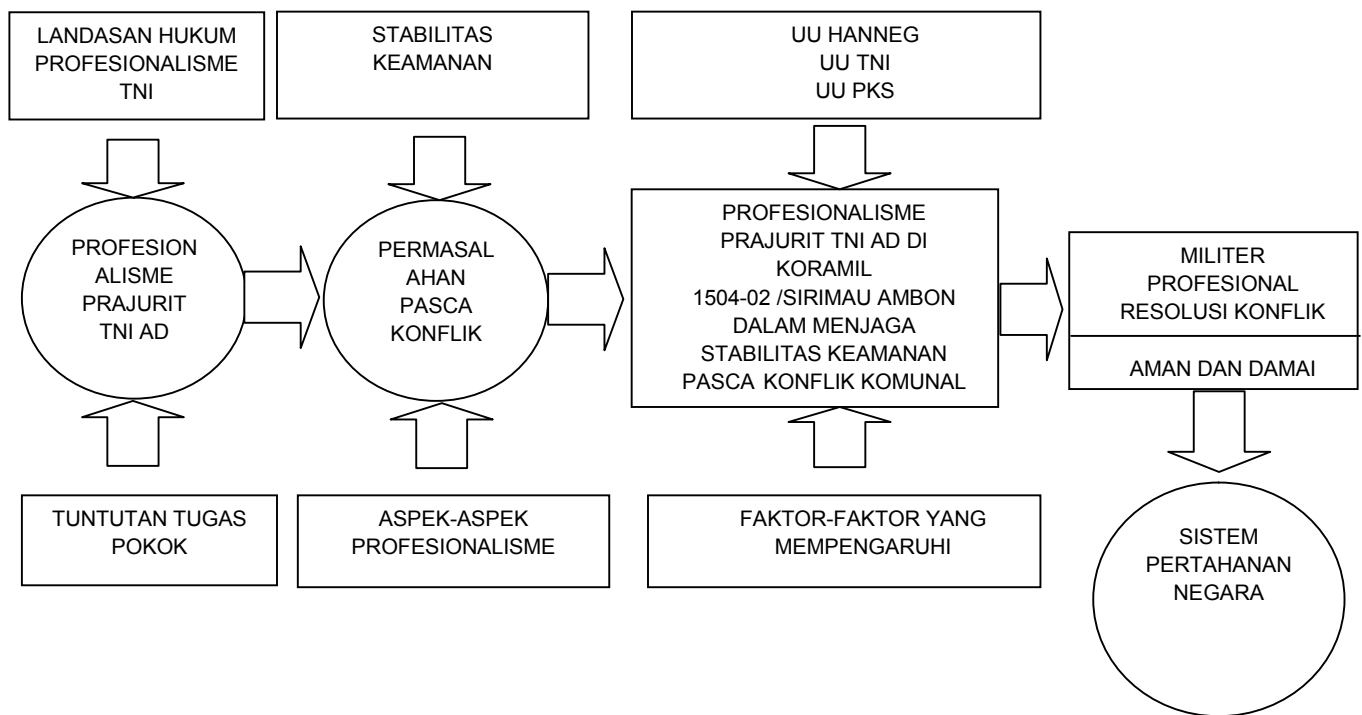
- *Kedua, Tanggung jawab sosial yang khusus (Social Responsibility).*

Seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi yang terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tanggung jawab pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat itu seorang perwira seolah-olah “milik pribadi” komandannya dan harus setia kepadanya. Pada masa profesionalisme seorang perwira berhak mengoreksi komandannya jika sang komandan bertentangan dengan kepentingan negara (*national interest*).

- *Ketiga, Karakter koorporasi (corporate character) yang melahirkan rasa esprit de corps yang kuat.*

Setiap aktivitas di dunia militer identik dengan ketiga indikator tersebut diatas. Tingkat profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02 Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik sangat tergantung dari kemampuan prajuritnya untuk dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik. Adanya kemampuan prajurit di dalam memahami manajemen konflik serta dalam menggerakkan, mendorong, mendinamisasi dan membentengi TNI dari tendensi penyimpangan serta penyalahgunaannya baik secara internal maupun eksternal merupakan ciri dari profesionalisme TNI AD. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti maka peneliti melihat adanya permasalahan profesionalisme pasca konflik komunal. Profesionalisme prajurit ini dipengaruhi oleh faktor-faktor baik eksternal maupun internal. Hal ini akan menjadi output adanya kondisi militer yang profesional sehingga dapat melaksanakan resolusi konflik. Resolusi konflik akan dapat menghubungkan masyarakat yang bertikai sehingga dapat disepakati perjanjian damai. Bila resolusi konflik dapat dilakukan dengan baik oleh prajurit maka diharapkan kondisi stabilitas keamanan dapat tercipta, kondisi wilayah menjadi aman dan damai sehingga mendukung Sistem Pertahanan Negara Indonesia.

Selanjutnya penyampaian kerangka pemikiran dalam bentuk gambar selanjutnya disampaikan pada gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian di dalam penelitian ini digambarkan berawal dari permasalahan tentang profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik. Di dalam implementasi profesionalisme prajurit di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai prajurit maka prajurit belum dapat secara optimal menjalankan tugas-tugasnya secara ideal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon menyebabkan masalah ini sangat menarik dan perlu untuk diteliti. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menganalisa secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti untuk melakukan pembahasan terhadap fakta hasil penelitian.

3.2. Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian

3.2.1. Sumber Data

Arikunto (2006) berpendapat bahwa sumber data dikelompokkan ke dalam dua sumber utama yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian adalah Subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder.

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari informan yang terdiri dari pejabat Koramil 1504-02/Sirimau Ambon, Babinsa, Camat Sirimau kota Ambon, anggota TNI, tokoh masyarakat. Data lainnya khususnya tentang konflik komunal diambil dari berbagai sumber baik dari media literatur, data di instansi TNI dan juga Pemerintah Daerah, dokumen terkait seperti buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan literatur lain. Data tersebut tentunya juga sangat terkait dengan

profesionalisme prajurit yang diperoleh dari Kodam XVI/Pattimura dan jajarannya.

3.2.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian secara spesifik adalah informan atau nara sumber. Menurut Moleong dan Lexy J (2002) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan harus memiliki banyak pengalaman sesuai latar belakang penelitian. Subyek harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu dalam peristiwa yang terjadi. Disamping itu, menurut Sugiyono (2008) Informan adalah orang-orang pada lokasi penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian. Jadi ia harus mengetahui banyak tentang latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2008, hal.54) “merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang akan diteliti.

3.2.3. Obyek Penelitian

Di dalam penelitian ini obyek penelitian merupakan instansi pemerintahan dalam hal ini Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dan personel sipil atau militer yang mengetahui permasalahan di dalam penanganan konflik komunal dan pelaku di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal di kota Ambon, Propinsi Maluku.

Oleh karena itu sesuai dengan fokus penelitian, maka obyek yang akan dijadikan informan utama adalah :

1. Danramil 1504-02/Sirimau kota Ambon.
2. Ba Tuud Koramil 1504-02/Sirimau kota Ambon.
3. Masyarakat di Kota Ambon 1 (satu) orang.
4. Camat Sirimau Kotamadya Ambon 1 (satu) orang.
5. Anggota TNI AD (Bintara dan Tamtama) masing-masing 1 orang.

Adapun obyek penelitian di dalam penelitian ini yaitu tentang profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan passca konflik komunal.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Suatu hal yang penting dalam penelitian karya ilmiah hasil penelitian adalah data-data dan informasi dari segala objek yang akan diteliti sehingga penelitian tersebut menjadi obyektif, rasional dan faktual.

Arikunto (2006) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah “subyek dari mana data diperoleh” selanjutnya untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, ia mengidentifikasinya menjadi tiga bagian yaitu:

- *Pertama, Person*, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
- *Kedua, Place*, yaitu sumber data yang memberikan tampilan keadaan diam dan bergerak.

- *Ketiga, Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.

Peneliti di dalam rangka memperoleh keterangan dan fakta-fakta selengkap mungkin dari keadaan empirik dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono, ada beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, 2008, hal.129)

Atas pendapat Sugiyono tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

3.3.1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2008) “merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Melalui wawancara, peneliti akan dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Melakukan wawancara berarti melakukan penggalian informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur dalam arti peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02 /Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas pasca konflik komunal.

3.3.2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan metode ini peneliti berusaha mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Sehingga dengan teknik ini yang diamati bukanlah benda hidup tetapi benda mati.

Dalam hal ini, dokumen yang dibutuhkan adalah seperti data-data profesionalisme prajurit TNI AD pasca konflik komunal di Kota Ambon, Maluku dan data-data lain yang diperlukan.

3.4 Tehnik Analisis data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal ini adalah Model Miles and Huberman. Sugiyono (2008) di dalam bukunya yang berjudul memahami penelitian kualitatif, berpendapat tentang teknik analisis model Miles dan Huberman ini, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

- Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan hasil wawancara jumlahnya cukup banyak, untuk itu peneliti mencatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

- Data *Display* (penyajian data)

Setelah data dari lapangan hasil observasi serta wawancara, direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2008) menyatakan, "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Dengan menyajikan data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

- *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal peneliti lakukan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi kesimpulan awal yang dibuat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dibuat merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan penjelasan tentang teknis analisis data tersebut di atas, maka penulis mengambil langkah-langkah analisis data yang berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan profesionalisme TNI AD pasca konflik komunal di wilayah Ambon propinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan profesionalisme TNI AD dan konflik di wilayah Ambon Maluku khususnya tentang penanganan konflik dan pasca konflik di wilayah kota Ambon propinsi Maluku.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada dengan cara mendatangi kantor Koramil 1504-02/Sirimau Ambon, Ba Tuud Koramil 1504-02 Ambon berikut 2 anggota TNI, Camat serta masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Sirimau kota Ambon propinsi Maluku.

3. Setelah informasi yang di dapat dari observasi dan wawancara dengan informan maka tahap selanjutnya adalah mengolah data yang ada.

Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada dimana data yang didapat yang berhubungan dengan Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal.

3.5 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian di dalam penelitian Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal ini dilakukan dengan diawali dari instrumen penelitian. Peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian atau *human instrumen*. *Human instrumen* ini berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah memilih informan sebagai sumber data, yang dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Informan dipilih dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang akan diteliti. Selanjutnya melakukan pengumpulan data, diawali dengan pengumpulan data berdasarkan sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2011, p.225). Data yang dari data primer dan sekunder tersebut akan diuji keabsahan dan keterandalan data yang didapat.

Dalam penelitian profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal di Kota Ambon Propinsi Maluku ini menggunakan metode

penelitian kualitatif karena menurut peneliti, penelitian kualitatif dianggap paling cocok untuk menjawab permasalahan. Penelitian yang direncanakan akan menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif menganalisis data secara induktif dari tema-tema khusus ke tema-tema yang umum berfokus kepada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. (Creswell, 2009)

Seperti yang dikemukakan oleh Creswell (2009) bahwa penelitian digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, maka peneliti menganggap penelitian kualitatif dianggap cocok dalam memahami profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal. Selain itu pula dengan menggunakan jenis penelitian ini, objek penelitian peneliti akan lebih jelas, terbuka dan spesifik. Dengan metode penelitian kualitatif peneliti akan lebih leluasa dalam menginterpretasikan dalam hubungannya dengan temuan-temuan fakta di lapangan.

Alasan lain peneliti menggunakan metode ini karena metode ini cocok untuk digunakan pada tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya pada suatu fenomena secara intensif, mendalam, mendetail serta komprehensif sehingga upaya mencari solusi untuk dapat mewujudkan profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik di wilayah Ambon. Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena penelitian kualitatiflah yang menurut peneliti paling sesuai untuk meneliti bagaimana profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal di wilayah Ambon. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada penyelidikan untuk memahami berdasarkan pada pandangan informan yang terperinci

tentang suatu masalah seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008) bahwa realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak (teramati), tetapi sampai dibalik yang tampak tersebut.

Pandangan informan yang terperinci tentang suatu masalah mengharuskan peneliti untuk dapat mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Hal ini diungkapkan oleh Sugiyono (2008) "Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak".

Alasan lain menggunakan metode kualitatif yaitu karena dalam penelitian kualitatif suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa ruang khusus. Artinya, dalam penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari setiap objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian tentang profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal ini merupakan suatu bentuk proses serta dinamika yang harus dilihat sebagai suatu yang *holistic* (menyeluruh); setiap aspek di dalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Arikunto (2008) berpendapat, yakni: "Peneliti sebagai instrumen mengandung makna peneliti tersebut memiliki daya responsif yang tinggi yaitu mampu merespon sambil memberikan interpretasi terus menerus pada gejala yang dihadapi serta memiliki kemampuan dalam memandang obyek penelitiannya secara holistik, mengaitkan gejala dengan konteks saat itu, mengaitkan dengan masa lalu dan dengan kondisi lain yang relevan. Sehingga peneliti dapat melakukan analisis data sejak awal dengan melakukan interpretasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3.5.1 Instrumen Penelitian.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa panduan wawancara. Panduan wawancara ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari informan. Informasi yang diperoleh dari informan tersebut sangat diperlukan di dalam menganalisis permasalahan di dalam Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik.

3.5.2 Data Primer.

Data primer seperti yang sudah diuraikan diatas merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu informan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan yang terdiri dari Danramil 1504-02/Sirimau Ambon, Babinsa, Camat Sirimau kota Ambon, anggota TNI, tokoh masyarakat.

3.5.3 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka, membaca dan mempelajari dokumen-dokumen terkait seperti buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan literatur lain yang membahas tentang profesionalisme prajurit TNI AD di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal.

3.5.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Untuk dapat melihat keabsahan data yang didapat maka dilakukan dengan cara analisis kasus negatif. Moleong (1999) menyatakan bahwa Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan. Oleh karena itu peneliti mengambil kasus negatif dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi di wilayah Maluku pada tahun 1999 – 2004 dan konflik yang terjadi tahun 2011. Dari kasus tersebut

untuk menjelaskan profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal dalam rangka mendukung Sistem pertahanan Negara di wilayah darat

3.6 Definisi Operasional

Berikut definisi operasional yang akan digunakan di dalam penelitian ini :

1. Profesionalisme adalah suatu keahlian khusus yang diperoleh melalui latihan yang intensif (*special skill acquired thought intensive training*), adanya standar etik dan kepribadian (*standards of ethics and performance*), rasa kebersamaan kelompok (*a sense of group identity*) dan sistem administrasi yang baik (*system of internal administration*).
2. Militer Profesional adalah militer yang akan mencurahkan segala daya dan pikiran untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran yang ditentukan oleh Negara dalam bidang kemiliteran, serta betul-betul menyenangkan profesinya.
3. Prajurit TNI AD adalah seluruh anggota TNI AD yang merupakan bagian integral dari TNI. TNI AD yang harus dimaknai secara holistik, integral dan komprehensif yang mana TNI merupakan organisasi militer yang merupakan satu kesatuan postur militer. TNI sebagai institusi adalah institusi yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan di dalam rangka menghadapi berbagai ancaman Kepentingan Nasional (*National Interest*).
4. Stabilitas keamanan nasional adalah kondisi kemantapan, kestabilan dan ketenangan serta kemampuan bangsa Indonesia

melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

5. Konflik adalah sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya

6. Pasca Konflik adalah tahap dimana pada akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah lebih normal di antara kedua pihak. Namun, jika masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tersebut tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

7. Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan dan struktur konfliknya telah dirubah.

8. Konflik Komunal adalah konflik yang dipicu oleh eksklusivisme suku, agama, ras dan antar golongan serta kesenjangan sosial ekonomi. Kerugian yang diakibatkan oleh konflik komunal berupa gelombang pengungsian, penderitaan luar biasa terhadap masyarakat, korban jiwa, kerusakan berbagai infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas dalam skala besar menyebabkan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan. Resiko terbesar yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa.

3.7 Jadwal Penelitian.

Jadwal penelitian mulai dari persiapan hingga pelaksanaan ujian sidang telah dirancang melalui beberapa tahapan berikut :

1. Penelitian Pendahuluan/Penjajagan dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai Januari 2015. Tahap ini merupakan penelitian studi kepustakaan dan mencari informasi seputar profesionalisme, profesionalisme militer profesionalisme TNI/TNI AD, teori konflik termasuk di dalamnya teori manajemen konflik dan teori resolusi konflik serta stabilitas keamanan yaitu mengumpulkan literatur, referensi dan peraturan-peraturan yang menjadi acuan dari penentuan pemilihan judul usulan penelitian yang menarik untuk diteliti.
2. Penyusunan Proposal Penelitian dilaksanakan mulai dari Januari sampai Maret 2015. Judul penelitian yang diusulkan setelah disetujui oleh pembimbing, selanjutnya dimulai penyusunan proposal penelitian yang juga harus disetujui oleh pembimbing.
3. Seminar Proposal Penelitian, dilaksanakan pertengahan Maret 2015.
4. Perbaikan Proposal Penelitian, Memperbaiki proposal penelitian (setelah seminar) apabila mendapat perbaikan dan disetujui pembahas dan pembimbing, kemudian menerima surat ijin untuk melakukan penelitian. Diperkirakan dilakukan selama 14 (empat belas) hari, yaitu pada akhir bulan Maret 2015.
5. Penelitian lapangan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu: April, Mei dan Juni 2015.
6. Tahap penyusunan laporan penelitian dilaksanakan selama bulan Juni, Juli dan Agustus, September 2015.

7. Proses bimbingan dilaksanakan selama 4(empat) bulan yaitu : Juni, Juli, Agustus dan September 2015.

8. Ujian Tesis dilaksanakan pada Oktober 2015.

Tahapan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	TAHUN												
		2014/2015												
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Persiapan Awal	X												
2	Penyusunan Usulan penelitian		X	X	X									
3	Seminar Proposal Penelitian				X									
4	Perbaikan Proposal Penelitian				X									
5	Penelitian Lapangan					X	X	X						
6	Penyusunan laporan (Tesis)							X	X	X	X			
7	Proses Bimbingan							X	X	X	X			
8	Ujian Tesis													X

(Sumber: Olahan peneliti 2015)

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian.

4.1.1 Gambaran Umum Koramil 1504-02 Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku.

Koramil 1504-02/Sirimau berada di bawah Kodim 1504 kota Ambon yang merupakan jajaran dari satuan Korem 151/Binaiya Kodam XVI/Pattimura. Secara geografis posisi Koramil ini cukup strategis karena terletak di belakang pusat niaga kota Ambon yaitu di sekitaran pelabuhan Ambon (Port of Ambon), pasar Mardika, Mall Amplas (Ambon Plasa), Kantor Gubernur Maluku dan Lapangan Merdeka, Ambon.

Koramil 1504-02/Sirimau yang berada tepat di belakang kota Ambon ini memiliki sektor wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah teritorial Koramil 1504-02 meliputi 2 kecamatan, 10 kelurahan, dan 9 desa dengan perincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Sirimau terdiri dari :
 - a. Kelurahan Waihoka.
 - b. Kelurahan Amantelu.
 - c. Kelurahan Rijaliu.
 - d. Kelurahan Karang Panjang.
 - e. Kelurahan Batu Meja.
 - f. Kelurahan Batu Gajah.
 - g. Kelurahan Ahusen.
 - h. Kelurahan Honipopu.
 - i. Kelurahan Uritetu.
 - j. Kelurahan Pandan Kasturi.
 - k. Desa Galala.
 - l. Desa Hative Kecil.
 - m. Desa Batu Merah.

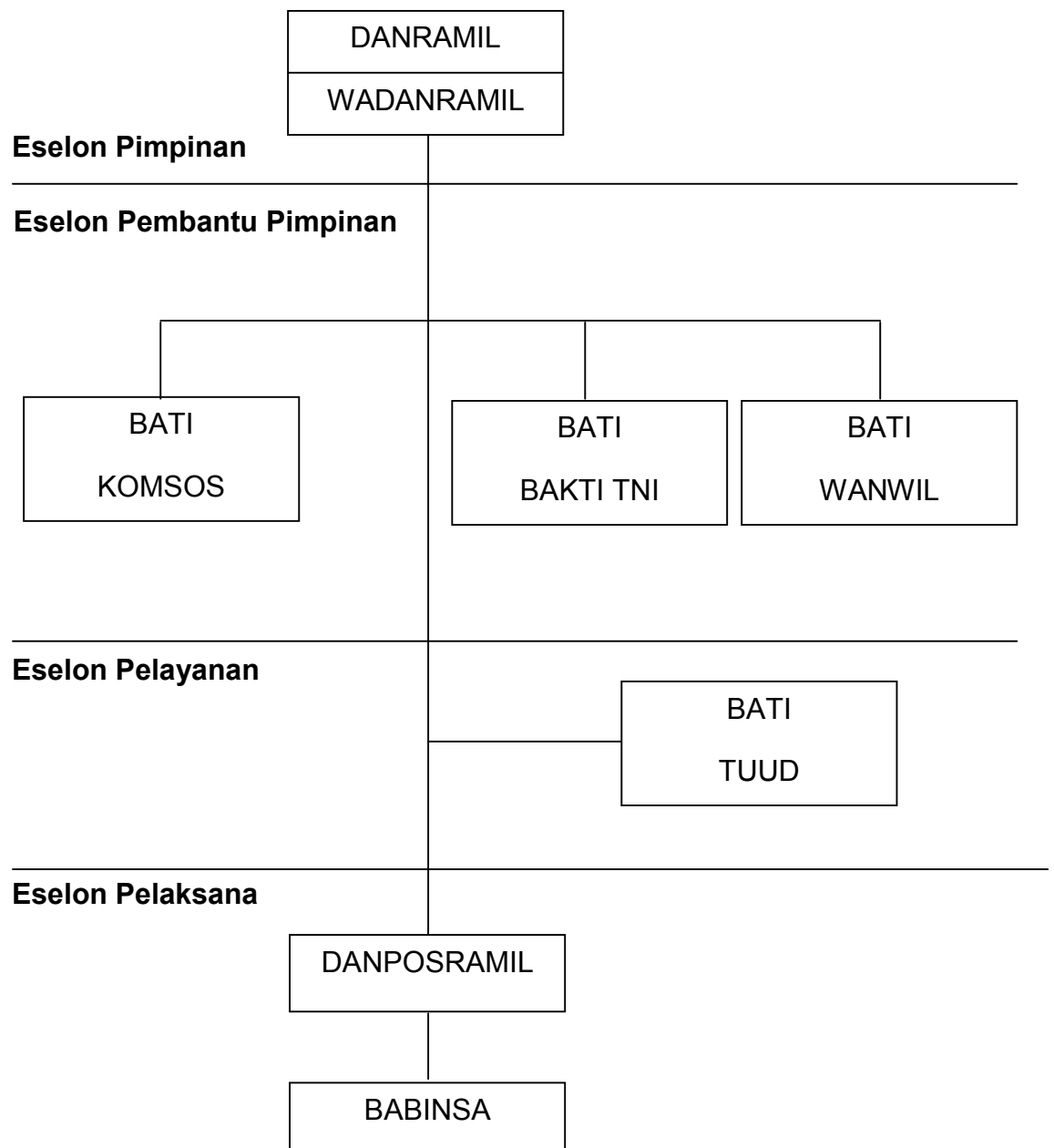
- n. Desa Soya.
2. Kecamatan Leitimur Selatan terdiri dari :
- a. Desa Hatalai.
 - b. Desa Naku.
 - c. Desa Kilang.
 - d. Desa Ema.
 - e. Desa Hukurila.
 - f. Desa Hutumuri.
 - g. Desa Rutong.
 - h. Desa Leahari.

4.1.2 Struktur Organisasi

Koramil 1504-02/Sirimau Ambon merupakan Koramil dengan tipe B dengan Komandannya berpangkat Kapten serta memiliki tingkat pengeselonan sebagai berikut:

- 1. Eselon Pimpinan
- 2. Eselon Pembantu pimpinan
- 3. Eselon Pelayanan.
- 4. Eselon Pelaksana

Adapun struktur organisasi Koramil 1504-02 digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Koramil dengan wilayah lebih dari 1 Kecamatan.

4.1.3 Tugas Pokok dan Tugas-tugas

1. Koramil 1504-04/Sirimau Ambon bertugas menyelenggarakan pembinaan pembinaan teritorial, kemampuan

dan kekuatan untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Dandim 1504/Ambon.

2. Tugas-tugas (Melaksanakan Fungsi Utama)

a. Pertempuran:

- Pembinaan ruang pertempuran. Memelihara daerah operasi pertempuran yang ada di wilayahnya guna pelaksanaan tugas pokok Dandim.
- Pembinaan Kesiapan Operasi. Memelihara kemampuan rakyat terlatih yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan OMP dan OMSP.

b. Pembinaan Teritorial:

- Mengumpulkan dan memelihara data tentang geografi, demografi, demografi,serta kondisi sosial yang ada di wilayahnya guna mendukung pelaksanaan sistem pertahanan semesta.
- Mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dan kemandirian TNI Rakyat di wilayah; dan
- Membangun,memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemandirian TNI Rakyat.

3. Tugas (melaksanakan Fungsi Organik TNI AD). Meliputi kegiatan di bidang intelijen, operasi, sumber daya manusia (SDM), logistik dan teritorial dalam mendukung tugas pokok Koramil.

4.1.4 Organisasi

1. Susunan Organisasi.

Susunan organisasi Koramil disusun 1504-02/Sirimau berdasarkan eselon dan jabatan sebagai berikut :

- a. Eselon pimpinan. Komandan Komando Rayon Militer disingkat Danramil.
- b. Eselon Pembantu Pimpinan.
 - Bintara Sosial, disingkat Bati Komsos.
 - Bintara Tinggi Bakti TNI, disingkat Bati Bakti TNI.
 - Bintara Tinggi Perlawanan Wilayah, disingkat Bati Wanwil.
- c. Eselon Pelayanan. Bintara Tinggi Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Bati Tuud.
- d. Eselon Pelaksana.
 - Komandan Pos Rayon Militer.
 - Bintara Pembina Desa, disingkat Babinsa.

4.1.5 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Danramil Sirimau dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya sesuai dengan fungsinya.
 - b. membuat rencana kegiatan pembinaan ketatalaksanaan Binter sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas dan tanggung jawabnya.
- d. melaksanakan pembinaan kemampuan dan mental serta peningkatan kesejahteraan, moral, hukum, disiplin dan tata tertib satuan.
- e. melaksanakan pendataan geografi, demografi dan kondisi sosial serta memeliharanya guna mendukung pelaksanaan tugas OMP dan OMSP di wilayahnya.
- f. melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya sesuai rencana kerja Kodim untuk mewujudkan RAK juang yang tangguh dan Kemanunggalan TNI Rakyat.
- g. melaksanakan pembinaan perlawanan rakyat guna mendukung pelaksanaan sisem pertahanan semesta di wilayahnya.
- h. melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim.

Danramil dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggungjawab kepada Dandim.

2. Bati Komsos

Bati Komsos dijabat oleh seorang Bintara Tinggi Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan Satu merupakan pembantu Danramil dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. membuat rencana kegiatan Komunikasi Sosial meliputi, pemilihan sasaran/obyek, penentuan bentuk-bentuk Komunikasi Sosial, penentuan waktu dan tempat sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Komunikasi Sosial di wilayahnya dengan instansi terkait sesuai stratanya.
- c. mengawasi pelaksanaan Komunikasi Sosial di wilayahnya.
- d. mencatat fakta/data dan perkembangan aktual yang ditemukan pada proses Komunikasi Sosial.
- e. mencatat pendapat perorangan/kelompok dan umum tentang kesan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan Komunikasi Sosial.
- f. memantau perubahan sikap dan tingkah laku komunikan baik secara perorangan maupun kelompok dari pesan Komsos yang telah disampaikan.
- g. mempelajari dan menguasai kondisi lingkungan yang ada di masyarakat guna menyesuaikan kegiatan Komsos.
- h. membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial di Wilayah Koramil.

Bati Komsos dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

3. Bati Bakti TNI.

Bati Bakti TNI dijabat oleh seorang Bintara Tinggi Angkatan Darat berpangkat Pembantu Lenan Satu merupakan pembantu Danramil dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. membantu pembuatan rencana kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan oleh Kodim dalam penentuan sasaran (fisik dan non fisik) di wilayah tugas tanggung jawab Koramil.

- b. menyusun rencana kegiatan Bakti TNI di wilayah Koramil.
- c. mengoordinasikan kegiatan Bakti TNI dengan aparat terkait sesuai dengan stratanya.
- d. mencatat fakta/data dan perkembangan aktual yang ditemukan pada kegiatan Bakti TNI
- e. menyusun laporan kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan di wilayah Koramil.

Bati Bakti TNI dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

4. Bati Wanwil

Bati Wanwil dijabat oleh seorang Bintara Tinggi Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan Satu merupakan pembantu Danramil dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. membuat rencana kegiatan Pembinaan Wilayah Perlawanan Wilayah sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda guna pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta wawasan kebangsaan.
- c. melaksanakan pencatatan terhadap hasil kegiatan Pembinaan Perlawanan Wilayah di wilayahnya.
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perlawanan wilayah yang dilakukan oleh anggota Koramil kepada Danramil.

Bati Wanwil dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

5. Bati Tuud.

Bati Tuud dijabat oleh BintaraTinggi Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan Satu merupakan unsur pelayanan Danramil, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. membuat rencana kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.
- b. membina dan memelihara serta melaporkan perubahan/perkembangan data teritorial Koramil.
- c. melaksanakan kegiatan administrasi dan urusan dalam Makoramil.
- d. melaksanakan administrasi peningkatan keterampilan, kemampuan, moril dan disiplin personel Koramil.

Dalam melaksanakan tugasnya Bati Tuud dibantu oleh satu Bintara Administrasi yang dijabat oleh seorang Bintara Angkatan Darat berpangkat Sersan Mayor, yaitu Bintara Administrasi Tata Usaha dan Urusan Dalam disingkat Bamin Tuud.

Bati Tuud dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

6. Danposramil.

Danposramil dijabat oleh seorang Bintara Tinggi Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan Satu merupakan pelaksana Koramil yang wilayahnya lebih dari satu kecamatan dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan Binter sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab wilayah penugasannya.
- b. melaksanakan koordinasi dengan Muspika dalam rangka pembinaan teritorial di daerah kecamatan yang berada di wilayah tanggung jawabnya.
- c. mengoordinir, mengawasi dan membantu mengendalikan para Babinsa yang berada di Kecamatan sesuai dengan petunjuk Danramil.
- d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Danramil terhadap perkembangan situasi dengan kegiatan yang ada di wilayah tugasnya.

Danposramil dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

7. Babinsa.

Babinsa dijabat oleh seorang anggota militer Angkatan Darat berpangkat Kopral satu sampai dengan Pembantu Letnan Satu merupakan pelaksana Koramil dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan Pembinaan Teritorial sesuai petunjuk Danramil.
- b. melaksanakan pengumpulan data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi nasional meliputi SDM, SDA/SDB serta sarana dan prasarana di wilayahnya.
- c. memberikan informasi tentang situasi dan kondisi wilayah bagi pasukan yang bertugas di daerahnya.
- d. melaporkan perkembangan situasi kepada Danramil pada kesempatan pertama.

Babinsa dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

4.2 Analisa Data

4.2.1 Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02 /Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal

Di dalam penelitian ini, untuk menganalisis profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal digunakan teori sebagai instrumen. Instrumen tersebut digunakan dalam rangka membangun kerangka berpikir untuk melihat dan memahami masalah penelitian. Di dalam konteks ini teori dan konsep yang digunakan adalah teori profesionalisme militer Samuel Huntington, teori dan konsep yang terkait dengan Stabilitas Keamanan, teori Konflik, teori peran dan teori komunikasi.

Disamping menggunakan teori tersebut diatas sebagai bahan pendukung dalam pertimbangan analisa data di dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan legalitas hukum yaitu UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU no.34 Tahun 2004 dan UU no. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang mengatur tentang ketentuan peran, tugas dan tanggung jawab serta fungsi dari TNI di dalam penanganan konflik sosial. Di dalam analisa penelitian ini penjelasan dari Samuel Huntingtington tentang profesionalisme militer akan digunakan sebagai teori utama untuk menganalisis masalah penelitian karena penjelasan dalam aspek-aspek tersebut dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui suatu analisis.

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti di Koramil 1504-02/Sirimau kota Ambon diperoleh informasi yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian profesionalisme prajurit TNI AD Koramil 1504-02 Sirimau kota Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal. Hal tersebut akan dijelaskan melalui penjelasan di bawah ini karena profesionalisme prajurit berkaitan

pula dengan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi profesionalisme.

Seperti yang telah diuraikan di Bab sebelumnya bahwa pada intinya profesionalisme dapat dikatakan sebagai suatu kecakapan / kemampuan ataupun kemahiran yang diperoleh oleh seseorang dengan mengikuti pelatihan dan kemampuan tertentu. Hal ini mengakibatkan mereka dengan keahliannya pantas untuk dihargai dengan mendapatkan upah atau mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Apabila dicermati dengan seksama maka profesionalisme TNI AD yang ada saat ini bukanlah merupakan suatu produk jadi yang siap pakai dan bisa diperoleh begitu saja. Profesionalisme TNI khususnya TNI AD merupakan suatu proses dan juga merupakan suatu kondisi dinamis yang harus terus diperjuangkan, baik oleh jajaran TNI/TNI AD sendiri maupun oleh para pemangku kepentingan atau *stake holder* lainnya. Profesionalisme dalam operasionalnya ditentukan pula oleh Sistem, SDM maupun Alutsista. Sedangkan yang mempengaruhi mutu profesionalisme TNI/TNI AD itu sendiri adalah SDM TNI.

Profesionalisme militer terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu :

- *Pertama*, Keahlian (*Expertise*).

Suatu kekuatan militer memerlukan pengetahuan yang mendukung untuk mampu mengorganisir, merencanakan dan mengarahkan aktivitasnya baik dalam keadaan perang maupun damai.

- *Kedua*, Tanggung jawab sosial yang khusus (*Social Responsibility*).

Seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi yang terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tanggung jawab pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat itu seorang perwira seolah-

olah “milik pribadi” komandannya dan harus setia kepadanya. Pada masa profesionalisme seorang perwira berhak mengoreksi komandannya jika sang komandan bertentangan dengan kepentingan negara (*national interest*).

- *Ketiga*, Karakter korporasi (*corporate character*) yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat.

Berdasarkan ketiga ciri yang diungkapkan oleh Huntington tersebut maka peneliti mencoba menganalisis profesionalisme prajurit dihadapkan dengan teori utama tersebut dengan didukung oleh teori-teori pendukungnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan Danramil pada tanggal 7 Mei 2015 dan Camat Sirimau pada tanggal 11 Mei 2015, peneliti menemukan adanya permasalahan tentang profesionalisme prajurit di wilayah tersebut. Adapun kondisi profesionalisme yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

- *Pertama*, Ditinjau dari aspek keahlian (*Expertise*) ditemukan bahwa prajurit terutama Babinsa di Koramil 1504-04/Sirimau Ambon sudah dapat melaksanakan tugasnya di dalam melaksanakan komunikasi sosial dengan baik. Namun, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan masih terbatas pada kalangan menengah ke bawah. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan prajurit dengan aparat Kecamatan masih terlihat hanya pada level pimpinan saja dan belum banyak ditemukan koordinasi antar staf Koramil dan staf Kecamatan.

- *Kedua*, Ditinjau dari aspek tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) ditemukan bahwa prajurit telah melaksanakan komunikasi dengan masyarakat di luar jam dinas. Masyarakat cukup terbuka dengan prajurit terutama di bidang keamanan dan

kondisi wilayah tersebut. Hal ini sangat bermanfaat di dalam pencegahan konflik secara dini. Namun di di dalam melaksanakan komunikasi masih ditemukan prajurit yang belum dapat menjadi tauladan karena masih adanya prajurit yang minum-minuman keras di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, Ditinjau dari aspek Karakter korporasi (*corporate character*) ditemukan pimpinan yang memberikan bantuan finansial terhadap anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini tentunya bukan mencirikan profesionalisme prajurit. Di dalam kondisi yang juga mengalami keterbatasan bantuan dengan semangat jiwa korsa pimpinan merelakan penghasilannya untuk membantu prajurit. Hal ini dikhawatirkan akan mendorong pimpinan untuk mencari sumber tambahan lain di luar gaji baik untuk menjalankan tugas pokoknya maupun untuk membantu ekonomi prajuritnya di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan Serda Patrick, peneliti juga menemukan adanya permasalahan tentang kesejahteraan prajurit di wilayah tersebut. Peneliti menggunakan konsep profesionalisme militer di Indonesia yang diungkapkan oleh Arismunandar yaitu dari dimensi/aspek Kompetensi, Akuntabilitas dan Kesejahteraan.

Ditinjau dari aspek/dimensi Kesejahteraan yang ditemukan dari hasil wawancara di lapangan adalah sebagai berikut :

- *Pertama*, Prajurit belum seluruhnya menempati yang layak karena terbatasnya jumlah perumahan. Hal ini mengakibatkan prajurit masih banyak yang kontrak/kos.
- *Kedua*, Prajurit sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu kondisi perekonomian terkait mahalnya harga-harga barang di wilayah tersebut.

- *Ketiga*, Prajurit harus mengeluarkan ongkos yang cukup besar karena perumahan cukup jauh dari tempat tinggal prajurit sehingga prajurit memerlukan tambahan pengeluaran.

4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan Pasca Konflik Komunal.

4.2.2.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan indikator-indikator profesionalisme militer yang dikemukakan oleh Samuel Huntington diatas maka peneliti telah melaksanakan kegiatan turun/terjun ke lapangan untuk mendapatkan temuan di lapangan sebagai bahan yang akan dianalisis di dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pencapaian profesionalisme prajurit TNI AD di koramil 1504-02/Sirimau Ambon. Permasalahan profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02 Sirimau/Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik terkait dengan faktor-faktor baik faktor pendukung maupun faktor penghambat terwujudnya profesionalisme prajurit TNI AD. Faktor-faktor pendukung maupun penghambat profesionalisme prajurit di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik di kota Ambon tersebut akan diuraikan secara terperinci pada penjelasan berikutnya.

Berikut akan diuraikan berbagai temuan di lapangan yang difokuskan terhadap aspek profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal yang difokuskan kepada aspek kemampuan/keahlian, tanggung jawab sosial dan *esprit de corps*.

a. Aspek Kemampuan/Keahlian (*Expertise*).

Sesuai dengan Teori Samuel Huntington bahwa konsep kemampuan atau keahlian menyebutkan bahwa suatu kekuatan militer

memerlukan pengetahuan yang mendukung untuk mampu mengorganisir, merencanakan dan mengarahkan aktivitasnya baik dalam keadaan perang maupun damai. Begitu pula halnya dengan militer di Indonesia khususnya TNI AD. Oleh karena itu maka aspek pertama yang akan menjadi penelitian ini adalah aspek kemampuan/keahlian.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan unsur pimpinan di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dan juga wawancara dengan personel-personel baik dari unsur TNI AD maupun sipil yang terkait masalah profesionalisme prajurit. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan khususnya pertanyaan universal tentang situasi dan kondisi keamanan dan perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah kota Ambon pasca konflik tahun 2011. Peneliti berdasarkan indikator dan panduan wawancara melaksanakan wawancara diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat **universal**. Pertanyaan-pertanyaan universal tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang profesionalisme prajurit Koramil 1504-02 Sirimau kota Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya dalam meningkatkan profesionalisme.

Wawancara yang dilaksanakan di kantor Koramil Sirimau di Kota Ambon dengan informan Danramil 1504-02 Kapten Inf M. Rizal pada tanggal 7 Mei 2015. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan universal terkait tentang situasi dan kondisi Ambon saat ini, perubahan-perubahan kondisi sosial yang terjadi, komunikasi yang dilakukan prajurit dengan masyarakat dan pengaruh positif/negatif adanya pendatang terhadap situasi dan kondisi di kota Ambon maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut ;

“ Situasi dan kondisi keamanan secara umum di Ambon saat ini ditinjau dari IPOLEKSOSBUDKAMTIB maupun kondisi MILITER/PERTAHANAN cukup baik dan berjalan dengan kondusif. Masyarakat sekarang sudah tidak takut seperti dahulu lagi saat konflik yang terjadi tahun 1999-2004 maupun pasca

konflik tahun 2011 yang lalu. Tidak ditemukan lagi masyarakat yang ragu untuk beraktivitas dan tidak tampak adanya ketakutan lagi dalam melaksanakan profesinya masing-masing. Masyarakat secara umum sudah jenuh dengan adanya konflik dan masyarakat serta hanya berpikir bagaimana caranya mencari makan. Tapi kami selaku aparat tetap waspada dengan kondisi di wilayah kami karena daerah kami ini merupakan daerah rawan konflik. Kerukunan sudah mulai terlihat dengan mulai kembalinya masyarakat antar agama terutama dalam hal perdagangan. Terkait dengan lalu lintas perdagangan, warga Ambon merasakan adanya keuntungan dengan telah kembalinya warga pendatang yang mengungsi sehingga membuat roda perekonomian kembali bergerak di kota Ambon pasca konflik 2011 yang lalu.”

Dari hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat universal tersebut dapat dilihat secara umum pada kehidupan dan situasi keamanan yang relatif stabil. Diperoleh temuan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan konflik dan fokus terhadap untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun kerukunan antar beragama dapat dikatakan belumlah pulih seperti sebelum konflik, namun upaya ke arah tersebut sudah diupayakan secara terus-menerus oleh pemerintah dibantu oleh aparat TNI AD. Di sisi lain aparat keamanan dalam hal ini prajurit TNI AD di Koramil 1504-02 yang mengalami pahitnya kehidupan saat konflik terjadi selalu waspada terhadap adanya ancaman yang dapat muncul kembali. Temuan lainnya adalah dengan kembalinya warga pendatang telah menjadikan perekonomian di kota Ambon kembali berjalan seperti semula meskipun dengan segala keterbatasannya.

Terkait dengan pertanyaan tentang profesionalisme prajurit Koramil 1504-02/Sirimau di kota Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik lebih lanjut khususnya pertanyaan-pertanyaan terkait tentang Keahlian (*Expertise*). Pertanyaan yang diajukan yaitu berkaitan tentang koordinasi dan komunikasi sosial prajurit Koramil dengan

masyarakat, media yang digunakan dalam pertemuan yang diadakan dan hasil positif yang diperoleh serta kerjasama yang dilakukan dengan tokoh agama dan masyarakat, Danramil menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

“Koordinasi dan komunikasi sosial prajurit TNI AD dengan masyarakat berjalan dengan baik. Hal ini diperoleh karena adanya koordinasi dan komunikasi antara para Babinsa dengan masyarakat di wilayah kota Ambon. Hubungan para Babinsa dengan warga khususnya dengan tukang ojek pedagang kaki lima dan masyarakat di kota Ambon telah dapat memberikan suatu informasi yang sangat cepat dan berharga di dalam pelaksanaan tugas. Media dalam berkomunikasi sosial yang digunakan Babinsa di lapangan adalah dengan metode dialog di saat-saat waktu senggang dalam bekerja para masyarakat tersebut. Di sisi lain di kalangan pimpinan TNI AD terjadi pula komunikasi pula yang baik dengan aparat pemerintah melalui forum-forum komunikasi bernama TRIPIKA dengan unsur pemerintahan Kecamatan Sirimau Ambon yang rutin diadakan setiap bulannya. Komunikasi itu membuat adanya saling pengertian di dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Prajurit di lapangan juga selalu melaksanakan anjingsana dan kerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat di dalam rangka untuk mencegah konflik di daerah ini.”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan dan ditemukan jawaban permasalahan bahwa di dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari prajurit TNI AD selalu melaksanakan komunikasi sosial dan koordinasi secara kontinyu untuk tetap dapat menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut meskipun dengan berbagai tantangannya dilapangan. Program-program kerja dari TNI AD dilaksanakan secara baik meskipun dengan segala keterbatasan anggaran dan dukungannya. Dari uraian tersebut maka hal ini sejalan dengan teori pendukung yaitu Teori Komunikasi dan Koordinasi sebagai teori pendukung yang digunakan oleh peneliti.

Berdasarkan pada hasil wawancara tentang pertanyaan Universal dan penelitian aspek Keahlian (*Expertise*) maka diperoleh keterangan bahwa :

- a. Masyarakat sudah jenuh dengan adanya konflik.
- b. Prajurit TNI AD melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens di tengah-tengah masyarakat.
- c. Pada tataran pemimpin maka Danramil melaksanakan forum komunikasi TRIPIKA dengan aparat pemerintah dan kepolisian.

b. Aspek Tanggung Jawab Sosial yang khusus (*Social Responsibility*)

Seperti yang disampaikan oleh Samuel Huntington bahwa Tanggung jawab sosial seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi yang terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tanggung jawab pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat itu seorang perwira seolah-olah “milik pribadi” komandannya dan harus setia kepadanya. Pada masa profesionalisme seorang perwira berhak mengoreksi komandannya jika sang komandan bertentangan dengan kepentingan negara (*national interest*). Dari pernyataan Huntington itulah maka peneliti mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan aspek Tanggung Jawab sosial yang khusus.

Mengenai aspek tanggung jawab sosial yang khusus (*social responsibility*) maka lebih lanjut peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang meliputi pertanyaan tentang keterlibatan personel Koramil di luar jam dinas, kedekatan dan keterbukaan masyarakat serta pengaruh kehadiran personel Koramil dalam mengeliminir potensi konflik. Di dalam wawancara disampaikan oleh salah satu anggota Babinsa Koramil 1504-02 Serda Patrick. Serda Patrick menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“ Eee...beta sering melaksanakan Binter dengan ngobrol- ngobrol deng warga di pangkalan ojek,Ndan. Masyarakat sini su terbuka dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat baik dari aspek ekonomi maupun politik. Masyarakat di Ambon sini seng mau lai diadu domba tentang masalah SARA. Masyarakat selalu terbuka deng saya karena beta sering ngobrol dengan tukar rokok seperti istilah di daerah Sunda itu “adu bako” atau saling memberikan rokok dengan masyarakat seperti pedagang di pasar, kaki lima, tukang becak dan tukang ojek di Batu Gajah di wilayah desa binaan saya sehingga saya bisa dapat informasi terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan konflik di masyarakat. Saya rasa ini salah satu bentuk kepercayaan dan kerjasama masyarakat terhadap tugas saya sebagai Babinsa.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditemukan bahwa di dalam melaksanakan komunikasi sosial Babinsa dapat menerapkan media komunikasi sosial dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterbukaan masyarakat di dalam memberikan informasi terkait masalah ekonomi maupun politik. Nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang terkandung di dalam metode Binter yang diterapkan di dalam melaksanakan Komunikasi Sosial merupakan suatu keahlian prajurit di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam menjalankan tugasnya.

Peneliti juga menemukan temuan dalam wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap Camat Sirimau kota Ambon Drs. H. Herman Tetelepta,M.Si. pada tanggal 11 Mei 2015 tentang aspek tanggung jawab sebagai berikut :

“ Masyarakat saat ini cukup terbuka di dalam menyampaikan hal-hal terkait dengan keamanan dan ketertiban yang mana TNI AD juga turut berperan di dalamnya. Kritikan-kritikan masyarakat juga disampaikan secara terbuka terutama di dalam forum-forum resmi.

Kritikan berkisar pada masalah misalnya terdapat anggota TNI yang di dalam pergaulan di luar dinas ikut melaksanakan minum-minuman keras dengan masyarakat. TNI diharapkan dapat menjadi contoh atau tauladan di dalam kehidupannya sehari-hari di luar jam dinas. Masyarakat terbuka di dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan informasi-informasi tentang keamanan khususnya tentang potensi konflik seperti perkelahian antar pemuda. Disamping itu masyarakat juga terbuka terhadap situasi ekonomi terkini di wilayah Ambon. Peran Babinsa yang ditempatkan di wilayah kelurahan dan negeri-negeri kami juga selama ini telah dapat mengeliminir timbulnya konflik di masyarakat.”

Dari pernyataan Camat tersebut maka ditemukan bahwa prajurit Koramil 1504-02 baik pimpinan maupun masyarakat terlihat sering berinteraksi di luar jam dinas. Masyarakat cukup terbuka terhadap prajurit TNI AD dan kadang juga memberikan kritik terhadap prajurit TNI AD yang ikut melaksanakan minum-minuman keras di masyarakat. Masyarakat juga terbuka terhadap situasi ekonomi terkini di wilayah kota Ambon. Kehadiran prajurit TNI AD di tengah-tengah masyarakat juga turut mengeliminir potensi konflik.

Berdasarkan pada hasil wawancara tentang aspek Tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) diperoleh keterangan bahwa :

- a. Aspek tanggung jawab sosial prajurit terutama terhadap kerja Babinsa di lapangan sudah cukup terlihat di masyarakat.
- b. Aspek tanggung jawab pimpinan di dalam melaksanakan Komunikasi dengan aparat pemerintahan telah dapat dilaksanakan melalui forum TRIPIKA.
- c. Prajurit melaksanakan kegiatan komunikasi di luar dari pada jam dinas dengan masyarakat. Namun, masyarakat mengharapkan anggota TNI AD dapat menjadi contoh untuk tidak terlibat di dalam minum-minuman keras.

c. Aspek Karakter Korporasi (*corporate character*)

Teori Samuel Huntington tentang karakter korporasi menyatakan bahwa Karakter korporasi (*corporate character*) akan melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat. Oleh karena itu maka peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan karakter korporasi yang melahirkan jiwa korsa (*esprit de'corps*) yang terkait dengan profesionalisme militer. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang karakter korporasi yang terdiri dari upaya, komitmen serta apresiasi yang dilakukan untuk profesionalisme serta metode dan langkah-langkah yang diambil dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Danramil 1504-02/Sirimau diperoleh informasi sebagai berikut :

“ Pimpinan itu harus bisa memikirkan kesejahteraan prajuritnya. Bisa dibayangkan pak, anggota saya yang gajinya lebih kurang hanya 3 juta rupiah saja. Untuk transportasi saja ke tempat kerja saja menggunakan ojek Rp. 30.000,- pulang pergi. Belum lagi dia harus membeli makan siang sekitar Rp 15.000,-persekali makan makanan yang sangat sederhana. Bisa kita perkirakan untuk dana transportasi saja lebih kurang hampir 1,2 juta rupiah. Belum lagi dia harus memikirkan biaya anak untuk kuliah karena rata-rata anggota saya sudah senior dan memiliki anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Saya sering malam-malam didatangi anggota saya yang mengalami kesulitan keuangan. Saya sering membantu anggota saya dengan menggunakan dana pribadi saya untuk membantu kehidupan mereka karena seringkali mereka terkendala dengan masalah keuangan di keluarganya. Sedangkan untuk penempatan perumahan dinas disini harusnya dapat diupayakan agar tidak terlalu jauh dengan kantor dan berkualitas baik karena daerah ini kan rawan banjir dan gempa juga.”

Senada dengan Danramil, Serda Patrick menyampaikan bahwa kebutuhan hidup di kota Ambon ini cukup berat dan sulit karena tingginya harga barang di Ambon. Peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme prajurit dengan mengajukan pertanyaan terkait inflasi, harga barang kondisi kesejahteraan prajurit dan terkait tunjangan kemahalan.

“Harga-harga disini jauh sekali lebih mahal dengan harga di Jawa. Saya pernah kursus di Pusdikpassus Batujajar, Cimahi, disana saya kasi contoh Aqua galon kan cuman Rp.15.000 sedangkan disini Rp.45.000,-. Belum harga-harga kebutuhan pokok seperti daging dan sayur-sayuran semuanya serba mahal bila dibandingkan di Jawa. Setahu saya sampai sekarang masih ada anggota Koramil yang kontrak atau kost, malah ada yang masih tinggal dengan mertua karena tempat tinggal kan kurang. Saya sangat berharap pimpinan di Jakarta memikirkan adanya semacam tunjangan kemahalan kaya di Papua, Ndan untuk membantu kehidupan kami prajurit dalam mengatasi mahalnya harga-harga barang di Ambon ini, pak.”

Lebih lanjut peneliti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang upaya di dalam meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02 di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pendapat tentang profesionalisme, pengetahuan tentang konflik, kemampuan TNI AD dalam melibatkan tokoh dalam menyelesaikan konflik serta nilai-nilai lokal yang dipakai dalam resolusi konflik. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti saat melaksanakan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan anggota dewan pada tanggal 23 Mei 2015, M. Amin diperoleh pendapat beliau sebagai berikut :

“ Tentara itu harus bisa berfungsi sebagai *security* di dalam sistem keamanan negara di negara kita. Bagaimana mau amankan laut kalau kapal selamnya ada 7 buah terus yang 6 buah rusak. Belum lagi kondisi pesawat F-16 nya yang ada berapa terus yang operasional berapa saja. Tetapi memang sih dunia Internasional mengakui kehebatan dan militansi dari TNI AD nya yang tergelar di seluruh Indonesia sampai pelosok tanah air. Saya waktu masih anggota Dewan sering keluar negeri dan melihat bagaimana tentara profesional itu benar-benar kalau bertugas senjatanya canggih dan sangat mengikuti SOP mereka dalam bertugas. Sedangkan di Indonesia memang belum secanggih mereka, namun kita dapat melihat dengan adanya Koramil di daerah maka mereka dapat melaksanakan pendekatan sosial dan menghormati budaya lokal sehingga dapat mendukung terciptanya perdamaian hingga saat ini dapat dipertahankan. Pela Gandong salah satu nilai budaya atau kearifan lokal yang bermanfaat dalam menyelesaikan konflik disini, pak. Contohnya ; Saya punya Nenek yang beragama Nasrani, dulu waktu konflik di Pulau Buru saya yang beragama Islam turut mengamankan mereka di Ambon dan setelah aman saya kembalikan ke Pulau Buru ada 3 desa itu yang Mayoritas beragama Kristen sekarang sudah saya kembalikan kembali ke daerahnya dan *Alhamdulillah* hingga kini bisa hidup damai dengan kampung lainnya yang beragama Islam.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas maka dapat diperoleh temuan bahwa data-data bahwa profesionalisme menurut para informan tersebut memang terkait dengan adanya faktor pendukung yang dapat mendukung profesionalisme militer khususnya di Koramil 1504-02/Sirimau Kota Ambon. Tokoh masyarakat tersebut menilai kekuatan TNI AD yang tergelar hingga pedesaan merupakan suatu kekuatan jika bersinergi dengan masyarakat. Kearifan lokal yaitu Pela Gandong adalah cara yang dia lakukan di dalam menyelamatkan warga yang terimbas konflik komunal.

Peneliti kemudian mengadakan wawancara dengan Camat Sirimau kota Ambon Drs.Herman Tetelepta,M.Si. dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau pasca konflik komunal. Pertanyaan diajukan berkisar pada karakter korporasi yang di dalamnya berisikan tentang *concern* pimpinan di dalam meningkatkan profesionalisme, apresiasi yang diberikan, upaya dan juga langkah-langkah untuk mencapai profesionalisme serta penempatan perumahan ideal sebagai berikut :

“ Profesionalisme itu adalah kecakapan yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Terkait dengan pimpinan TNI AD maka saya melihat *concern* pimpinan selama ini sudah berkomunikasi dengan baik di dalam menangani konflik terutama di dalam menangani pekelahian antar pemuda. Saya harapkan di tingkat anggota Babinsa juga bisa berkomunikasi dengan jajaran saya di kantor kecamatan maupun di kelurahan atau negeri-negeri saya dengan baik. Saya kira penempatan Babinsa dan kegiatannya di dalam Bakti sosial maupun sosialisasi dan penyuluhan untuk memperdayakan masyarakat sudah cukup baik dan perlu untuk ditingkatkan terutama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk masalah perumahan saya tidak terlalu paham namun saya lihat anggota Koramil tinggalnya menyebar di tengah-tengah masyarakat. yang saya tahu hanya Asrama Militer di beberapa tempat yang saya lewati.Tekait kearifan lokal di wilayah kami ada istilah *Pela Gandong*, yaitu hubungan baik yang berdasarkan keturunan hubungan persaudaraan yang timbul akibat perang antar suku. Setiap tahun atau beberapa bulan sekali dilakukan *Panas Pela*, yakni menyatukan kembali persaudaraan tersebut.Itulah kerarifan lokal kami di dalam

menjaga situasi keamanan sehingga konflik ke depan dapat dihindari”

Dari hasil wawancara dengan Camat Sirimau kota Ambon diperoleh keterangan bahwa pimpinan Koramil berkomunikasi secara intens dengan masyarakat dan juga terlihat sering melaksanakan kegiatan Bakti TNI di wilayahnya. Untuk masalah perumahan diketahui bahwa sebagian besar anggota tinggal di masyarakat baik ikut orangtua/mertua atau kontrak/kost. Asrama militer sudah penuh ditempati oleh prajurit yang sudah dinas lebih dahulu di daerah itu sehingga prajurit yang baru berdinas di wilayah itu belum mendapatkan perumahan.

Berdasarkan pada hasil wawancara tentang penelitian pada aspek Karakter koorporasi, maka diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Koramil 1504-02/Sirimau Ambon memberikan bantuan secara pribadi untuk membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi.
- b. Perumahan masih jauh dari kantor Koramil sehingga membutuhkan biaya transportasi ojek/angkot.
- c. Prajurit mengharapkan adanya tunjangan kemahalan kepada pemerintah akibat mahalannya harga-harga bahan makanan di wilayah Ambon.
- d. Pemerintahan Kecamatan Sirimau mengharapkan adanya peningkatan peran serta prajurit Koramil di dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- e. Koordinasi dan komunikasi prajurit maupun pimpinan Koramil diperlukan lebih intensif untuk menguatkan peran pemerintahan pada penyuluhan-penyuluhan, maupun program-program pemerintah pada peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan temuan-temuan diatas telah dapat dilihat aspek-aspek yang mempengaruhi profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon. Hal ini dapat dilihat pada beberapa pendapat yang mengarah ke arah teori profesionalisme militer baik yang terkait dengan Keahlian, Tanggung jawab sosial dan juga Jiwa korsa yang kuat.

4.2.2.2. Faktor-faktor Penghambat.

Disamping adanya faktor-faktor pendukung di dalam profesionalisme prajurit TNI AD di atas maka ditemukan pula faktor-faktor penghambat profesionalisme prajurit di Korami 1504-02 Sirimau kota Ambon. Adapun faktor-faktor penghambat timbulnya profesionalisme sesuai dengan teori utama yang dikemukakan Samuel Huntington akan dijelaskan pada penjelasan dibawah. Peneliti melaksanakan wawancara dan menemukan adanya faktor-faktor penghambat profesionlisme di Satuan tersebut.

a. Faktor Internal

Wawancara yang dilaksanakan dengan Danramil 1504-02 Kapten Inf M.Rizal,S.Sos periode 2014-2015 tanggal 7 Mei 2015 terkait tentang faktor penghambat di dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah tersebut.

” Moril sebagian dari anggota Koramil saat ini tidak dapat dikatakan tinggi semua bahkan sebagian morilnya rendah. Hal ini dikarenakan faktor harga-harga barang di kota Ambon cukup tinggi. Kalau mau tanya kenapa harga-harga tinggi jangan salahkan warga Ambon tapi tanyakan para pengusaha-pengusaha terutama orang-orang pendatang dan pengusaha lokal Ambon yang saat ini menguasai sebagian besar sekor-sektor perdagangan di kota Ambon ini. Saya tadi sampaikan tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan anggota saya PP. dari kantor ke rumah yang begitu mahal “

Temuan di lapangan dari wawancara ini adalah moral anggota Koramil tidak bisa dikatakan baik karena terbentur masalah ekonomi. Disamping itu masih ada praktek-praktek menjalankan ekonomi dengan cara-cara yang kurang sehat dari pengusaha sehingga turut mempengaruhi harga-harga dan perekonomian warga di kota Ambon dan sekitarnya.

Peneliti kemudian mengadakan wawancara kepada Camat Sirimau Kota Ambon pada tanggal 11 Mei 2015 dan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme prajurit Koramil dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik. Pertanyaan yang diajukan adalah tentang inflasi dan harga barang, kondisi kesejahteraan prajurit, tempat tinggal dan terkait penempatan tempat tinggal dan tunjangan kemahalan di kota Ambon bagi prajurit TNI. Camat Sirimau kota Ambon Drs.H.Herman Teteleptu, M.Si. menjawab sebagai berikut :

“ Memang apabila dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia terutama propinsi di Pulau Jawa harga-harga barang di wilayah Ambon ini jauh lebih tinggi. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh distribusi barang menuju ke wilayah Ambon yang berupa kepulauan menyebabkan harga-harga barang menjadi mahal. Hal ini tentunya akan menyebabkan kondisi perekonomian cukup berat bagi PNS yang penghasilannya sangat terbatas termasuk anggota TNI AD di wilayah saya bertugas. Sepanjang pengamatan saya, prajurit Koramil disini kebanyakan tinggal di luar perumahan dinas. Melihat besaran penghasilan PNS saya termasuk TNI AD juga tentunya untuk berharap memiliki rumah yang layak dan diidamkan tentu sangat sulit tercapai. Pemerintah pusat tentunya diharapkan agar memperhatikan kesejahteraan prajurit di wilayah kepulauan seperti Ambon ini, belum lagi masalah biaya transportasi yang harus dia keluarkan dalam bertugas. Untuk itulah Pemerintah Maluku telah memasukkan Provinsi Maluku dan

Maluku Utara dalam salah satu propinsi Kepulauan sehingga diharapkan pembangunan dan perhatian pemerintah ke depan menjadi lebih besar lagi terhadap wilayah kita.

Dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwa dengan tingkat pendapatan yang ada sulit bagi anggota TNI AD di Koramil tesebut untuk memiliki rumah yang layak. Disamping itu biaya transportasi juga mempengaruhi besaran pengeluaran para anggota Koramil.

Berdasarkan pada wawancara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme prajurit Koramil dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Moril anggota Koramil masih belum baik diakibatkan pada faktor ekonomi yang masih belum layak.
2. Prajurit belum bisa memiliki perumahan yang layak karena tingkat pendapatannya yang masih sangat terbatas apabila dengan kondisi harga-harga barang di wilayah Ambon.
3. Harapan dari prajurit dan juga pemerintah kecamatan / Camat setempat berharap agar pemerintah pusat juga memperhatikan kesejahteraan baik prajurit maupun PNS di Kecamatan.

b. Faktor Eksternal

Lebih lanjut disampaikan oleh Danramil di dalam wawancara tentang dampak kehadiran pendatang terhadap kehidupan di kota Ambon sebagai berikut :

“Para pendatang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian di kota Ambon. Para warga pendatang khususnya dari Bugis, Buton dan Makassar dan juga dari Jawa memiliki semangat kerja yang tinggi sedangkan warga lokal etos kerjanya

masih jauh dari para pendatang dan cenderung malas sehingga kurang mampu bersaing dengan warga pendatang dalam penguasaan bidang-bidang ekonomi. Hal ini lah yang menimbulkan adanya kecemburuan antara pendatang dan warga lokal Ambon. Kecemburuan tersebut apabila tidak kita *manage* dengan baik maka akan dapat menimbulkan konflik SARA lagi di kemudian hari. Kalau mau tanya kenapa haraga-harga mahal tanyakan saja sama mereka para pengusaha yang punya modal, merekalah yang buat harga-harga menjadi mahal,pak. Para anggota saya di Koramil ini dalam kesehariannya karena bertugas di perkotaan, mereka sering mengadakan komunikasi sosial dengan berbincang-bincang di pasar sehingga mereka mengetahui berbagai kesulitan yang dialami masyarakat. Terkadang masyarakat memberikan contohnya ikan dan sayuran kepada anggota saya tersebut karena kedekatan mereka dengan pedagang di pasar.”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pendatang memiliki etos kerja yang lebih tinggi daripada warga lokal sehingga tingkat perekonomian dikuasai para unsur pendatang dari luar kota Ambon. Masyarakat lokal kurang mampu bersaing dengan para pendatang di wilayah Ambon. Oleh karena itu diperlukan kepedulian utk mencegah adanya konflik.

Sedangkan informasi yang diperoleh dari anggota Koramil yaitu Serda Patrick pada tanggal 7 Mei 2015 menyampaikan tentang kendala yang dihadapinya di lapangan sebagai berikut :

“ Masyarakat di daerah binaan saya di Desa Batu Gajah di kota Ambon sini rata-rata mereka benar-benar sudah bersikap individualis dan kurang begitu paham tentang tugas-tugas aparat teritorial di alam menyiapkan suatu Ruang, Alat dan Kondisi juang yang tangguh dalam mendukung pertahanan Negara kita. Kadang orang-orang etnis Tionghoa yang punya toko-toko itu kurang menganggap kami, pak kalau sudah kenal dengan para tentara

yang berpangkat Perwira padahal saya adalah Pembina di desa itu. Ini yang agak sulit di dalam melaksanakan komunikasi sosial dengan kalangan pengusaha itu,pak.”

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa sebagian masyarakat di wilayah Koramil terutama dari golongan menengah keatas menunjukkan sikap individualis dan tidak mau berinteraksi dengan Babinsa jika telah mengenal perwira di Satuan di Ambon.

Berdasarkan pada hasil wawancara tentang faktor eksternal diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Masyarakat masih banyak yang bersifat individualis terutama pada sektor perkotaan namun hal ini berbeda dengan kalangan menengah ke bawah. Kalangan menengah ke bawah umumnya lebih dekat dengan anggota Koramil terutama yang berada di pedesaan atau di pasar-pasar tradisional.
2. Para pengusaha-pengusaha di wilayah Ambon masih ada yang mempraktekkan hal-hal yang kurang baik (monopoli) dalam perdagangan sehingga harga barang menjadi mahal.
3. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sistem pertahanan negara dengan terutama peran prajurit Koramil dalam menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh.

4.2.3. Upaya yang dilakukan Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Pasca Konflik Komunal secara profesional.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disampaikan upaya yang dilakukan oleh Koramil 1504-02/Sirimau Ambon untuk mencapai profesionalisme prajuritnya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai profesionalisme prajurit TNI AD telah dilakukan oleh Koramil 1504-02 yang merupakan bagian dari Kodim 1504-Ambon Korem 151/Binaiya Kodam XVI/Pattimura dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pembinaan Teritorial di wilayahnya

masing-masing. Program-program kerja yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan peran Babinsa dalam memonitor wilayah hingga membantu masyarakat melalui program Serbuan Teritorial diantaranya adalah mendukung pemerintah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan. Serbuan Teritorial ini dilakukan atas arahan terpusat dari Kasad dengan tidak menghilangkan kegiatan program Satuan Kewilayahan yang sudah ada terkait dengan Pembinaan Teritorial. Metode Binter yang dilakukan oleh Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di lapangan antara lain melalui Bakti TNI AD dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap kegiatan Bakti TNI AD melalui kegiatan TMMD dapat digalakkan kembali guna membantu kesulitan masyarakat di dalam perbaikan infrastruktur secara skala prioritas dan sistematis. Kehadiran TNI AD di tengah-tengah masyarakat diharapkan akan dapat mencegah konflik di daerah yang menjadi sasaran kegiatan Bakti TNI AD tersebut.

Danramil 1504-02/Sirimau kota Ambon juga secara rutin melaksanakan Komunikasi Sosial yang dilakukan oleh Danramil melalui kegiatan forum TRIPIKA yang merupakan forum silaturahmi Aparat Pemerintahan Kecamatan, TNI dan Polri. Di dalam forum tersebut Danramil selalu menyuarakan kondisi terkini kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingnya di bawah binaan atau sektor kerja dari Koramil. Danramil juga seringkali menyampaikan tentang perkembangan dan masalah-masalah yang diterima masyarakat seperti salah satunya adalah masih tingginya barang-barang di kota Ambon apalagi menjelang Lebaran, Natal dan Tahun baru.

Program Kerja Kodim 1504 Ambon khususnya tentang Komunikasi Sosial dilaksanakan secara rutin oleh prajurit Koramil 1504-02/Sirimau Ambon. Ada beberapa kegiatan Komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh prajurit tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pembinaan peningkatan kemampuan Komsos kepada seluruh Prajurit Koramil 1504-02/Sirimau kota Ambon.
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan Komsos dengan Aparat Pemerintah di Wilayah masing-masing guna menciptakan kondisi yang kondusif dengan Aparat pemerintahan .
- c. Melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan segenap komponen masyarakat guna mensosialisasikan visi dan misi TNI-AD.
- d. Menyelenggarakan dan melaksanakan Komsos dengan Keluarga Besar TNI di jajaran Koramil 1504-02/Sirimau kota Ambon.
- e. Menyelenggarakan Komsos Kreatif dengan Masyarakat dan Mitra Karib dengan mengadakan berbagai macam lomba dan pertandingan di Wilayah jajaran Kodim 1504/Ambon.

Dari kegiatan komunikasi sosial tersebut prajurit diharapkan akan dapat mencapai sasaran yang ditentukan oleh Kodim 1504 Ambon. Adapun pencapaian sasaran Program Kerja Kodim 1504 Ambon yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pembinaan peningkatan kemampuan Komunikasi sosial kepada seluruh Prajurit Koramil 1504-02 Sirimau Ambon.
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan Komunikasi Sosial dengan Aparat Pemerintah di Wilayah masing-masing guna menciptakan kondisi yang kondusif dengan Aparat pemerintahan .

- c. Melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan segenap komponen masyarakat guna mensosialisasikan visi dan misi TNI-AD.
- d. Menyelenggarakan dan melaksanakan Komunikasi sosial dengan Keluarga Besar TNI di jajaran Kodim 1504/Ambon.
- e. Menyelenggarakan Komunikasi sosial Kreatif dengan Masyarakat dan Mitra Karib dengan mengadakan berbagai macam lomba dan pertandingan di sektor Wilayah jajaran Koramil 1504-02 Ambon .

Apabila dilihat dari kegiatan prajurit di Koramil 1504-02/Sirimau tersebut maka kegiatan Komunikasi Sosial yang dilakukan sejalan dengan Teori Komunikasi yang diuraikan di dalam landasan teori yang digunakan penulis. Di dalam teori tersebut prajurit telah melaksanakan Komunikasi meskipun ditemukan belum dapat sepenuhnya dipahami oleh masyarakat tujuan mereka melaksanakan koordinasi tersebut.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02 /Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal.

Ambon merupakan salah satu kota yang terdiri dari beragam suku bangsa. Etnik-etnik yang terdapat di pulau Ambon antara lain; Ambon, Jawa, Bali, Sunda, Manado, Cina/Tionghoa, Bugis, Buton, Makasar, Madura, Seram dan suku lainnya. Keseluruhan etnik yang tinggal di kota Ambon tersebut memiliki perkumpulan-perkumpulan dan setiap kegiatan pawai atau parade mereka menampilkan kebudayaan mereka masing-masing.

Kehidupan sosial dan kerukunan umat beragama di kota Ambon paca konflik tahun 2011 sudah terjalin cukup baik dan kondusif. Di kota Ambon saat ini dapat dilihat tidak ada golongan agama tertentu dengan profesi khusus tertentu. Hal tersebut mengakibatkan terdapat adanya kesamaan perlakuan terhadap semua lapisan masyarakat meskipun

memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Konflik yang terjadi sebelumnya nampaknya memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi warga Ambon sehingga mereka sangat mengharapkan perdamaian yang ada tetap terjaga dan fokus terhadap peningkatan ekonomi. Di sisi lain, peran prajurit TNI AD dapat dirasakan manfaatnya di dalam upaya pencegahan konflik dengan senantiasa menjaga stabilitas keamanan wilayah. Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon sangat terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Disamping itu profesionalisme militer jelas sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur profesionalisme militer seperti yang disebutkan oleh Samuel Huntington. Dari hasil yang diperoleh setelah terjun ke lapangan maka dapat dianalisis tentang hal-hal yang terkait dengan profesionalisme prajurit TNI AD tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dan dengan melihat temuan-temuan di lapangan maka dapat diperoleh pemahaman tentang profesionalisme TNI AD dan keterkaitannya di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik. Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon yang profesional harus memiliki kemampuan/keahlian (*Expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan karakter korporasi (*cooperate character*) serta harus mahir di dalam menggunakan senjata dan juga terukur di dalam setiap tindakannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa profesionalisme TNI AD di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal adalah keahlian/kemampuan serta kemahiran prajurit yang memiliki tindakan/cara-cara yang dilakukan dengan cara mengimplementasikan salah satu metode Binter yaitu koordinasi dan komunikasi sosial dengan segenap komponen masyarakat. Disamping itu kemampuan prajurit itu juga ditunjang oleh kemampuan menerapkan langkah-langkah di dalam manajemen dan resolusi konflik di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal. Setiap tindakan prajurit itu juga senantiasa terukur di dalam implementasinya di lapangan serta sangat perlu untuk ditunjang tingkat kesejahteraannya agar dapat

bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntutan pekerjaannya secara profesional dan proporsional.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Indonesia baik melalui Kementerian Pertahanan maupun dari pihak Mabes TNI dan Mabasad sangat perlu memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh guna mewujudkan profesionalisme sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 34 tahun 2004 dan teori-teori profesionalisme sebagai acuan. Perhatian yang diberikan dan dilakukan harus lebih proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah Indonesia. Perhatian yang lebih besar tentu harus diberikan bagi prajurit yang bertugas di daerah-daerah dengan kondisinya memiliki tantangan dan permasalahan yang kompleks. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 yang ada saat inipun seharusnya dapat dijabarkan lebih rinci lagi oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah maupun Permenhan untuk dijabarkan lebih teknis tentang adanya konsep arah kebijakan pertahanan Negara yang lebih komprehensif. Kebijakan tentang pertahanan Negara itu tentunya diharapkan nantinya akan mengandung kebijakan untuk mewujudkan jati diri prajurit TNI yaitu prajurit Profesional agar dapat dicapai di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian dari tahapan konflik diatas juga, maka dapat dikatakan bahwa di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal maka konflik harus dapat ditangani secara cepat, baik dan tepat agar konflik tidak terjadi lagi menjadi pra konflik. Penempatan-penempatan pasukan dalam menjaga situasi pasca konflik harus tepat sasaran dan dapat menjamin stabilitas di dalam menyelesaikan adanya konfrontasi antara sesama masyarakat. Sumber konflik dapat terjadi karena berbagai sebab sehingga sumber konflik yang beragam tersebut membuat sulit untuk mendeskripsikan secara jelas dan terperinci dari sumber konflik itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas dapat ditemukan bahwa konflik di Ambon yang awalnya berasal dari konflik antar pemuda akhirnya berkembang menjadi konflik antar kampung dan berubah menjadi membesar sehingga menjadi konflik

bernuansa SARA. Kemampuan serta profesionalisme prajurit TNI AD di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik ini ini akan dapat dicapai apabila aspek-aspek profesionalisme dan pemahaman tentang konflik dan penanganan pasca konflik diperhatikan dengan baik.

4.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dalam menjaga stabilitas keamanan Pasca Konflik Komunal

Adapun faktor-faktor pendukung profesionalisme TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon ditinjau dari segi Keahlian (*Expertise*) maka Prajurit TNI AD melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens di tengah-tengah masyarakat. Komunikasi Sosial dan koordinasi dilakukan oleh aparat Koramil baik dengan masyarakat maupun terhadap aparat Pemerintah melalui forum-forum TRIPIKA. Ditinjau dari segi tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) maka Metode Binter TNI AD diimplementasikan berupa adanya Komunikasi Sosial oleh prajurit khususnya yang dilaksanakan oleh Babinsa Koramil 1504-04/Sirimau Ambon di lapangan sudah cukup terlihat di masyarakat. Disamping itu pula Koordinasi antara Instansi merupakan upaya yang dilaksanakan agar dapat mencegah konflik dapat terulang. Prajurit melaksanakan kegiatan komunikasi di luar dari pada jam dinas dengan masyarakat. Namun, masyarakat mengharapkan anggota TNI AD dapat menjadi contoh untuk tidak terlibat di dalam minum-minuman keras di tengah-tengah masyarakat. Dari segi *Coorporate Character* telah dapat menimbulkan adanya semangat *esprit de corps* seperti contoh adanya bantuan dari Komandan terhadap bawahannya menimbulkan suatu ikatan yang kuat antara atasan dan bawahan walaupun ini tidak sesuai dengan ciri profesionalisme yang dikemukakan oleh Huntington.

Adapun faktor penghambat profesionalisme diantaranya adalah moral yang rendah karena tidak adanya perhatian berupa tunjangan kemahalan dari pemerintah terkait harga-harga barang yang lebih mahal dari pada di daerah lainnya. Kurangnya fasilitas perumahan prajurit

sehingga prajurit harus mengontrak atau kost di luar komplek perumahan dinas. Disamping itu masih terbebannya prajurit dengan biaya transportasi karena jarak dari rumah menuju kantor yang cukup jauh sehingga mengurangi pendapatan/penghasilan dari prajurit tersebut.

Prajurit Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di lapangan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai profesionalisme TNI AD yang diharapkan sesuai Program kerja dari kesatuan atas. Pelaksanaan kegiatan Binter yang dilakukan baik pada metode Bakti TNI maupun Komunikasi sosial dilakukan agar dapat menjaga dan memelihara kondusifnya stabilitas keamanan pasca konflik. Berdasarkan teori konflik Fisher tentang kondisi pasca konflik maka kondisi stabilitas keamanan harus dijaga agar situasi pasca konflik ini tidak kembali menjadi pra konflik. Hal ini sangat penting dipelihara dan dijaga oleh seluruh prajurit TNI AD khususnya di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon agar konflik tidak terjadi kembali di kemudian hari.

4.3.3 Upaya yang dilakukan Prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Pasca Konflik Komunal secara profesional.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik dilakukan aparat Koramil 1504-02/Sirimau Ambon dengan melaksanakan program-program Binter di wilayah kota Ambon. Anggota Koramil secara fisik turut terlibat di dalam melaksanakan kegiatan gotong rotong seperti pembersihan pasar Mardika di kota Ambon, pembersihan teluk Ambon dan perbaikan sarana publik dan membantu pembangunan rumah miskin (bedah rumah) pada masa pasca konflik. Kegiatan non fisik yang dilaksanakan adalah melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda maupun kepolisian. Pendekatan itu dimaksudkan untuk menekankan pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama. Disamping itu secara non fisik prajurit Koramil 1504-02/Sirimau juga mendukung kegiatan kegiatan Satuan yang lebih atas baik Kodim, Korem maupun Kodam dalam memberikan

wawasan kebangsaan kepada tukang becak dan tukang ojek di kota Ambon.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa :

a. Profesionalisme prajurit TNI AD di Koramil 1504-04 Sirimau Ambon di dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik belum optimal berdasarkan pada hasil analisis dihadapkan dengan menggunakan Teori Utama Profesionalisme. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada aspek Keahlian (*Expertise*) : Komunikasi sosial prajurit TNI AD di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon yang dilakukan baru menyentuh pada kalangan menengah ke bawah sedangkan koordinasi yang dilakukan baru pada level pimpinan saja dan belum terlihat koordinasi intens antar prajurit di level bawah dan staf Kecamatan.

Pada aspek Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*) : Prajurit sudah dapat melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan terbukanya masyarakat di dalam memberikan informasi untuk mencegah konflik. Namun, masih ditemukan prajurit yang belum dapat menjadi contoh atau tauladan di masyarakat di dalam berperilaku di luar jam dinas.

Pada aspek karakter korporasi (*Corporate character*): Adanya bantuan secara pribadi oleh pimpinan kepada bawahannya yang mengalami kesulitan ekonomi sedangkan kondisi kehidupan seluruh prajurit di wilayah Ambon tersebut cukup sulit serta dalam kondisi relatif sama.

b Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal antara lain : Moral anggota Koramil masih belum baik diakibatkan pada tingkat penghasilan yang masih belum layak jika dikaitkan dengan mahalnya harga-harga barang di daerah tersebut. Disamping itu belum terpenuhinya rumah yang layak dan

humanis bagi prajurit di Kesatuan tersebut. Adapun faktor eksternal antara lain ; Pemerintah belum memberikan tunjangan kemahalan, adanya sikap individualis pada sebagian masyarakat dan belum pahamnya masyarakat tentang tugas prajurit Koramil 1504-02/Sirimau.

c. Upaya yang telah dilakukan Koramil 1504-02/Sirimau di dalam mencapai profesionalisme adalah secara fisik dan non fisik. Secara fisik dilakukan melalui melalui kerja bakti, gotong royong, bedah rumah dan giat pembinaan teritorial lainnya. Kegiatan non fisik melalui Kegiatan non fisik yang dilaksanakan adalah melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda maupun kepolisian. Pendekatan itu dimaksudkan untuk menekankan pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama

5.2 Saran

5.2.1. Saran Teoritis

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang profesionalisme prajurit TNI AD dalam menjaga stabilitas keamanan pasca konflik komunal di konflik yang berbeda lokasi dengan penelitian ini

5.2.2 Saran Praktis

1. Perlu dilaksanakan pelatihan kepada prajurit di Koramil 1504-02/Sirimau Ambon di dalam melaksanakan Komunikasi Sosial khususnya komunikasi sosial yang dilaksanakan prajurit dengan kalangan golongan menengah ke atas.
2. Pemerintah pusat melalui Kemhan/Mabes TNI dan Mabesad perlu membuat kebijakan yang lebih baik serta kompeherensif tentang perlunya peningkatan kesejahteraan prajurit di wilayah Timur Indonesia khususnya di Kodam XVI/Pattimura. Hal ini sangat *urgent* dilakukan dengan pertimbangan sangat luasnya wilayah Kodam XVI/Pattimura yang terdiri dari Kepulauan (1807 pulau) serta meliputi dua provinsi yakni Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

3. Perlunya segera diimplementasikan peningkatan kesejahteraan melalui adanya tunjangan kemahalan di wilayah Kodam XVI/Pattimura untuk dapat meningkatkan moril dan taraf hidup prajurit di Kodam XVI/Pattimura baik yang berada di Ambon maupun bagi prajurit yang tinggal di pulau-pulau terluar.
4. Perlu dibangun perumahan yang layak huni dan humanis bagi prajurit dengan tetap memperhatikan aspek berbaurnya prajurit dengan berbagai latar belakang Suku, Agama dan Ras sehingga prajurit dapat memberikan contoh posisi netral prajurit di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Balu, Peter & Scoot, Richard. (1962) *Formal Organization*, San Fransisco : Chandler.
- Creswell, J.W. (2009) *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mix Methode Approach* Third Edition. California : Thousand Oaks.
- Effendy, Muhadjir. (2011) *Profesionalisme Militer : Profesionalisasi TNI*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Evans, Linda. (2008) *Profesionalism, profesionality, and development of education profesional*. England : British Journal of educational studies.
- Hamidi. (2004) *Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press.
- Huntington, Samuel P. (1957) *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-Military Relations*. Cambridge : Harvard University Press.
- Longman (2014) *Dictionary of Contemporary English New Edition*. England.
- Marshall, Andrew (2009) *Director of the Office of Net Assesment*, U.S : Dod.
- Moleong, Lexy J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Miall, Hugg, Ramsbotham, Oliver & Woodhouse, Tom (2002) *Resolusi Damai Konflik Kontemporer; Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

- Perlumetter, Armos (2009) *Militer dan Politik*. Jakarta : PT.Grafindo Perkasa.
- M.Echols,John dan Shadili, Hasan (1996) *Kamus Inggris Indonesia Cet.Ke 23* Jakarta : PT. Gramedia.
- Ratnawati, Tri (2006) *Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti* : Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Schein, E.H. (1962) *The Corporate Culture Survival Guide* : Fransisco: Jossey Bass A Willey Imprint.
- Susan, Novri. (2009) *Pengantar Sosiologi Konflik dan isu-isu kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. CV. Bandung : Alfabet.
- Tippe, Syarifudin(2012) *Human Capital Management Model Pengembangan Organisasi Militer Indonesia*.Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Widjayanto, Andi (2005) *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*; Jakarta.

B. Dokumen

- Letjen TNI Bambang Dharmono (2005) Makalah pada FGD for drafting manual Peace Building dengan tema “*Sustainable Peace on Post Conflict Indonesia*” tanggal 5 Februari 2005.
- Dokumen Sekretariat Jenderal Wantanas (2010), *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Indonesia* ; Wantanas : Jakarta ;
- Laporan Satuan Kodam XVI/Pattimura TA.2015
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (2008), *Organisasi dan Tugas Komando Rayon Milliter(NomorPerkasad/19/IV/2008)*: Jakarta.

C. Peraturan/Perundang-undangan

- Undang- undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Panglima TNI nomor 1 tahun 2014 tentang Peran Teritorial di dalam penanganan konflik sosial

D. Sumber Elektronik

[http://id.wikipedia.org/wiki/Teori konflik](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik) diakses pada 18 Oktober 2011

Kemhan RI “Indonesia sebagai negara maritim “ 28 Juli 2011 dalam <http://dmc.kemhan.go.id> pada Jurnal Pertahanan Agustus 2011, Volume 3, Nomer 2.

[https://www.academia.edu/4951784/Perjalanan Panjang Profesionalisme TNI](https://www.academia.edu/4951784/Perjalanan_Panjang_Profesionalisme_TNI) diakses pada 19 Pebruari 2014